

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANGKALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MOHAMMAD HILMI HIMAWAN

NIM : 145030101111062



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2018

MOTTO

"JIKA KAMU GEMETAR DENGAN KEMARAHAAN

ATAS SETIAP KETIDAK ADILAN,

MAKA KAMU ADALAH KAWANKU"

(Pemimpin Revolusi Kuba, "The Revolutionary")

---ERNESTO "CHE" GUEVARA---

"HIDUPLAH MENURUT KEYAKINANMU SENDIRI,
ADA KALANYA ERA INI MENENTUKAN SEGALANYA,

ITULAH PERTANYAAN DUNIA,

HARI DIMANA KITA AKAN BERKUASA"

(Pemimpin Pasukan Revolusi, "The Most Wanted Man")

---MONKEY D. DRAGON---

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten
Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Good Governance

Disusun Oleh : Mohammad Hilmi Himawan

NIM : 145030101111062

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 6 Maret 2018

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 6 Maret 2018

Mohammad Hilmi Himawan
NIM : 145030101111062

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 April 2018

Jam : 08.00 – 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Mohammad Hilmi Himawan

Judul : Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah Di
Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota

Anggota

Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

HALAMAN PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI

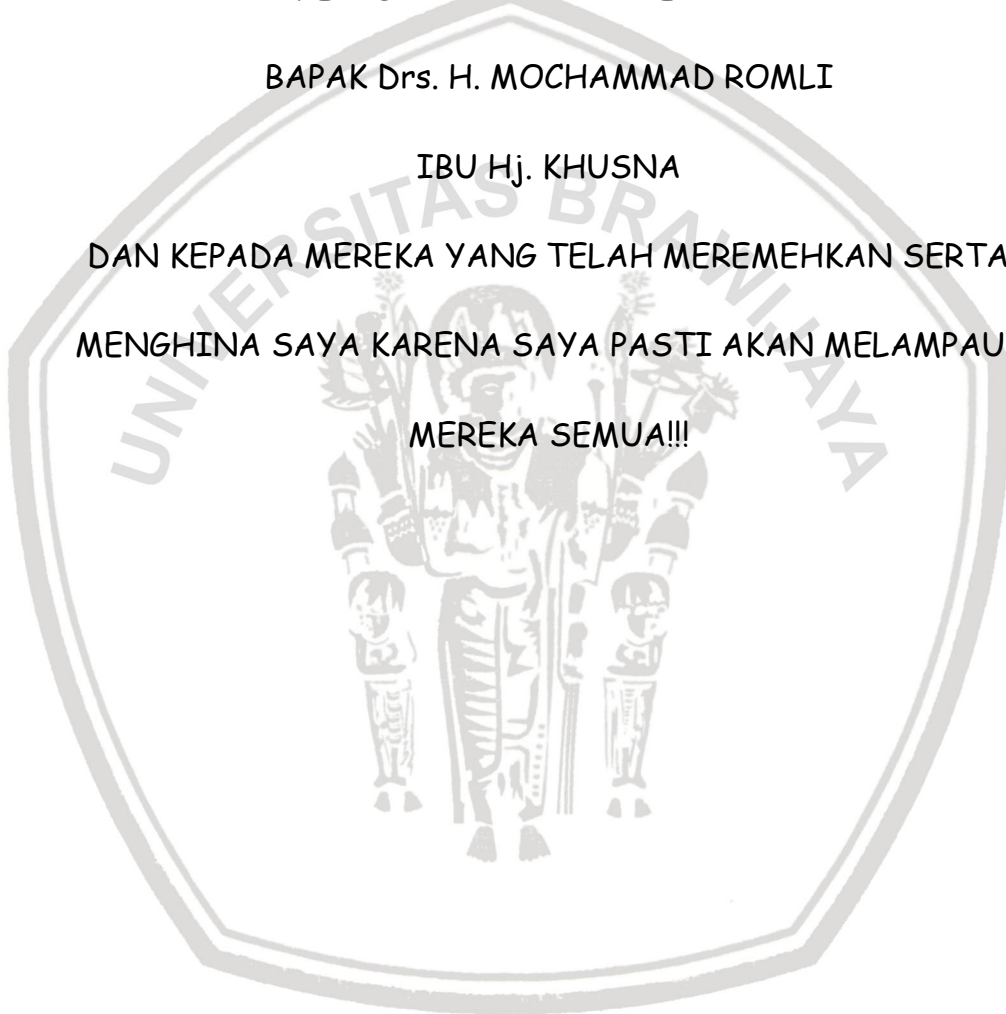
KEPADA ORANG TUA TERCINTA

BAPAK Drs. H. MOCHAMMAD ROMLI

IBU Hj. KHUSNA

DAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEREMEHKAN SERTA
MENGHINA SAYA KARENA SAYA PASTI AKAN MELAMPAUI

MEREKA SEMUA!!!



RINGKASAN

Mohammad Hilmi Himawan, 2018, **Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance***, Prof. Dr. Soesilo Zauhar MS.

Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah daerah di Pulau Madura yang dikenal dengan kepatuhannya terhadap tokoh agama khususnya kiai, hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Kabupaten Bangkalan beragama islam. Budaya “bhuppa’ babbhu’ ghuru rato” yang menjadi unsur penting dalam kehidupan sosial membuat kiai menjadi pemimpin informal. Fanatisme terhadap kiai begitu besar sehingga mengantarkan beberapa kyai menjadi anggota legislatif bahkan menjadi Bupati. Meskipun berpegang teguh pada budayanya namun kenyataannya Kabupaten Bangkalan masih jauh tertinggal dari daerah lainnya khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari yang pertama peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif good governance dengan sub fokus yaitu pengambilan keputusan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial. Fokus yang kedua adalah hubungan antar aktor dalam menyukkseskan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif good governance

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tokoh agama sangat berperan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan meskipun belum sesuai dengan prinsip *good governance*. Tokoh agama yang dominan adalah kiai yang bahkan mampu memberikan tekanan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya hubungan antar aktor tidak sesuai dengan prinsip good governance yang menganut paham tiga aktor, namun di Kabupaten Bangkalan terdapat empat aktor yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dan tokoh agama.

Kekuatan informatika mampu bersinergi dengan pemerintah daerah akan menghasilkan pembangunan yang mengagumkan namun di Kabupaten Bangkalan pemerintah daerahnya memberikan hak istimewa kepada tokoh agama islam (kiai) karena seharusnya prinsip good governance harus diterapkan kepada semua pihak bukan hanya kepada golongan tertentu saja. Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan harus lebih erat dengan semua tokoh agama terlepas dari aktor yang berada didalamnya. penerapan *good governance* di Kabupaten Bangkalan masih belum optima maka diperlukan kajian lebih jauh mengenai peletakan tokoh agama didalam good governance karena Indonesia merupakan negara yang urusan keagamaan diatur oleh hukum dan pemerintah.

Kata Kunci: Tokoh agama, pembangunan daerah, *good governance*.

SUMMARY

Mohammad Hilmi Himawan, 2018, **Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Good Governance**, Prof. Dr. Soesilo Zauhar MS.

Bangkalan regency is an area in Madura Island which is known for its obedience to religious leaders especially kiai, this is because majority of Bangkalan regency is Muslim. The culture of "*bhuppa' babbhu' ghuru rato*" which became an important element in social life made the kiai an informal leader. Fanatism towards kiai is so great that it leads some kyai to become legislative member even become Regent. Despite clinging to the culture but in reality Bangkalan regency is still far behind from other areas, especially in East Java Province.

This research is descriptive research with qualitative approach. The focus of this research consists of the first role of religious leaders in regional development in Bangkalan District viewed from the perspective of good governance with sub-focus of decision-making, infrastructure development and social development. The second focus is the relationship between actors in the success of regional development in Bangkalan Regency viewed from the perspective of good governance

Based on the research results found the fact that religious leaders play a very important role in regional development in Bangkalan District although not in accordance with the principles of good governance. The dominant religious figure is the kyai who is even able to put pressure on the local government of Bangkalan Regency. Furthermore, the relationship between actors is not in accordance with the principles of good governance that adheres to the three actors, but in Bangkalan there are four actors namely government, private, community and religious leaders

The strength of technology able to synergize with the local government will produce an amazing development, but in Bangkalan district, the local government gives the privilege to the religious leaders of Islam (kiai) because the principle of good governance should be applied to all parties not only to certain groups. The local government of Bangkalan Regency should be more closely with all religious leaders regardless of the actors inside. good governance in Bangkalan regency still not optima hence needed further study about laying of religion figure in good governance because Indonesia is a state which affairs religiuos regulated by law and government.

Keywords: Religious leader, regional development, good governance

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar MS selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat, serta Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang sabar sejak peneliti menjadi maba
5. Bapak Dr. rer. pol Romi Hermawan, Ibu Rispa Ngindana, M.AP dan Bapak Mochammad Chazienul Ulum, M.PA serta seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah memberikan keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Untuk Sam Aris Setiono, Sam Fajar Japer Junarto, Sam Heru D. Januar, Sam Antok, Sam Cahyo dan Zam Irfanul serta seluruh penghuni kos KL66
7. Untuk Freddy “Kumlol” Limantara dan Udhin “Hardcore” Pamungkas yang selalu bisa diandalkan untuk urusan perkopian dan sharing serta motivasinya dalam pengerjaan skripsi ini.

8. Untuk Ria Fitriani sebagai partner yang sangat sabar dalam menghadapi peneliti selama masa studi
9. Untuk Rizki Nurin, Monica Patricia, dan teman-teman FIA angkatan 2014 yang telah memberikan inspirasi dalam skripsi ini.
10. Untuk Cak Ri, Cak Giso, Sam Wahyu, Sam Riko dan Pak Muchtar serta teman-teman perparkiran FIA UB.
11. Untuk alumni Olimpiade Brawijaya 2015 khususnya Divisi Keamanan, Untuk Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA) Distrik UB dan teman-teman di seantero Universitas Brawijaya baik yang telah berstatus Alumni maupun yang masih aktif kuliah.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 6 Maret 2018

Mohammad Hilmi Himawan

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 14
A. Administrasi Publik.....	14
1. Pengertian Administrasi Publik.....	14
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik	15
B. Pembangunan	17
1. Pengertian Pemangunan.....	17
2. Pembangunan Daerah.....	19
3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan Daerah.....	21
C. <i>Good Governance</i>	22
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	22
2. Aktor <i>Good Governance</i>	24
3. Prinsip <i>Good Governance</i>	25
D. Teori Peran	28
1. Pengertian Peran	28
2. Peran Pemerintah (Pemimpin Formal) Dalam Pembangunan.....	29
3. Peran Pemimpin Informal Dalam Pembangunan	30

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan	40
1. Sejarah Lahirnya Kabupaten Bangkalan	40
2. Visi dan Misi serta Lambang Daerah Kabupaten Bangkalan	42
3. Kondisi Geografis Kabupaten Bangkalan.....	45
4. Kondisi Penduduk Kabupaten Bangkalan	48
B. Penyajian Data	52
1. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i>	52
a. Peran Tokoh Agama dalam Pengambilan Keputusan	54
b. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Infrastruktur	61
c. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Sosial	65
2. Hubungan antar Aktor dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i>	69
a. Kondisi Aktor Pembangunan di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i>	70
b. Hubungan antar Tokoh Agama dengan Pemerintah dan <i>Privat</i>	71
C. Pembahasan dan Analisis Data	74
1. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i>	74
a. Peran Tokoh Agama dalam Pengambilan Keputusan.....	75
b. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Infrastruktur	77
c. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Sosial	79
2. Hubungan antar Aktor dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i>	80
a. Tokoh Agama Sebagai Bagian dari Masyarakat (<i>Civil Society</i>)	82
b. Tokoh Agama Sebagai Bagian dari Pemerintah (<i>State</i>)	83
c. Tokoh Agama Berdiri Sendiri Sebagai Aktor (<i>Informal Leader</i>)	83

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia	4
Tabel 1.2 Suku dengan Jumlah Terbesar di Indonesia	4
Tabel 1.3 Negara dengan Jumlah Penganut Agama Islam Terbesar di Dunia ...	5
Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan/Desa, Luas Wilayah Kabupaten Bangkalan	46
Tabel 4.2 Letak, Tinggi dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bangkalan.....	47
Tabel 4.3 Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan	48
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015	49
Tabel 4.5 Persentase Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Bangkalan.....	50
Tabel 4.6 Jumlah Agama yang Dianut di Kabupaten Bangkalan.....	51
Tabel 4.7 Ormas Islam di Kabupaten Bangkalan	51
Tabel 4.8 Data Kehadiran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada Musrenbang di Kecamatan Bangkalan	53
Tabel 4.9 Daftar Hadir Tamu Undangan Hiring sekaligus Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.....	55
Tabel 4.10 Daftar Ulama pada Deklarasi Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat	57
Tabel 4.11 Permohonan Bantuan Pendanaan Bulan November 2017	62
Tabel 4.12 Daftar Kerjasama BLK dengan Pondok Pesantren	66
Tabel 4.13 Inventor non-Lokal di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2016	70

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Model Hubungan Interaktif Miles, Huberman dan Saldana	38
Gambar 2. Peta Kabupaten Bangkalan	40
Gambar 3. Lambang Daerah Kabupaten Bangkalan	43
Gambar 4. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Hiring di Kediaman Bapak H. Mochammad Romli Tahun 2017	56
Gambar 5. Gapura Bangkalan “Kota Dzikir dan Sholawat” Tahun 2017	58
Gambar 6. Pembangunan Pondok Pesantren Darul Mustofa Tahun 2017.....	63
Gambar 7. Kegiatan Otomotif di BLK Kabupaten Bangkalan Tahun 2017	66
Gambar 8. Aktor Pembangunan di Kabupaten Bangkalan	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia begitu indah dengan sejuta pesonanya namun semuanya berasal dari idealis pola pikir manusia yang terstruktur dan sistematis, hal ini menjadi pepoler dengan nama pembangunan. Kartasasmita (1994:6) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan memang seharusnya dilakukan secara terencana, secara sistematis dan objektif. Hal ini harus dilakukan karena pembangunan memiliki tujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan secara sistematis memiliki arti bahwa perencanaan pembangunan memiliki tahapan yang harus dilalui (*step by step*) sehingga proses pembangunan tidak memaksakan kehendak baik dari segi sumber daya maupun segi finansial. Pembangunan yang objektif memiliki makna pentingnya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (publik) bukan berarti pembangunan dilakukan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu.

Pembangunan haruslah memiliki sebuah konsep strategis untuk memaksimalkan *output* dan *outcome* yang telah menjadi target sebelumnya. Menurut Effendi (2002:114) terdapat 2 jenis pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Pembangunan fisik sangat mudah diukur, contohnya pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana). Pembangunan infrastruktur mudah untuk dilihat, mudah untuk dihitung, dan mudah untuk dinilai

(evaluasi). Jenis pembangunan yang kedua adalah pembangunan nonfisik yang memiliki karakteristik sulit diukur dan sulit untuk dilihat, salah satu contohnya adalah pembangunan sosial. Pembangunan sosial haruslah disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kesiapan masyarakat menerima pembangunan. Pembangunan sosial baru bisa dinilai keberhasilannya setelah dilakukan minimal 5 tahun (Adi, 2008:3) sehingga proses pembangunan sosial membutuhkan waktu yang lama dan dilakukan secara berkelanjutan (*continue*).

Pembangunan fisik maupun non fisik merupakan tugas pokok dari pemerintah (*government*). Tugas pemerintah untuk membangun negara tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menjadi dasar dalam pembentukan Bappenas. Bappenas merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi perencanaan dalam pembangunan. Menurut Pranadjaja (2003:24) Pemerintah merupakan institusi yang memberi perintah dan terdiri dari beberapa lembaga, sehingga Bappenas memerlukan koordinasi dengan lembaga lain dan juga partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Proses implementasi pembangunan tertelak pada lembaga teknis dalam pemerintah, sedangkan pengawasan dan evaluasi dilakukan bersama oleh Bappenas dan lembaga teknis serta pihak-pihak terkait lainnya. Melihat kompleksitas proses pembangunan maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dari setiap lembaga serta peran masyarakat demi keberhasilan pembangunan.

Pembangunan tentunya memiliki dasar yang kuat baik dari segi perencanaan, implementasi, maupun evaluasi sehingga diperlukan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*). Lipchack dalam Hakim (2013:10) mendefinisikan *good governance* sebagai fungsi pemerintah yang bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Tjokroamidjojo (2001:1) mendefinisikan *good governance* sebagai tata kelola pemerintah yang bisa memerintah, menguasai, mengurus dan mengelola. Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan sebuah prinsip yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aktor-aktor yang berada di dalamnya yang saling mendukung, bekerjasama, dan bersinergi untuk menyukkseskan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Daerah merupakan sebuah langkah maju dari pemerintah guna memaksimalkan pelaksanaan *good governance*. Salah satu caranya adalah mem-*break down* kewenangan pemerintahan pusat menjadi lebih spesifik kepada pemerintah daerah (desentralisasi), yang dapat menjadi sebuah keuntungan dalam praktik penerapan *good governance*. Keuntungannya adalah partisipasi masyarakat daerah menjadi lebih aspiratif sebab hirarki pengambilan keputusan tidak melewati banyak tahapan. Pemerintah menjadi lebih responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat sehingga *feedback* pemerintah menjadi lebih cepat dan akurat. Proses pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah menjadi lebih terbuka dan terspesifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah.

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki beragam corak sesuai dengan adat istiadat, budaya dan agama. Saat ini Indonesia adalah negara jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 260,5 juta jiwa yang tersebar di 35 provinsi.

Tabel 1.1
Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia

No.	Negara	Jumlah Penduduk
1.	Republik Rakyat China	1.388.232.693 jiwa
2.	India	1.342.512.706 jiwa
3.	Amerika Serikat	326.474.013 jiwa
4.	Indonesia	260.510.146 jiwa
5.	Brazil	211.243.220 jiwa

Sumber : CIA World Factbook. 2015

Jumlah itu terbagi menjadi 1.340 suku bangsa dengan jumlah suku terbesar di tempati suku Jawa, Sunda, Batak, dan Madura.

Tabel 1.2
Suku dengan Jumlah Terbesar di Indonesia

No.	Suku	Jumlah
1.	Jawa	95.217.022 jiwa
2.	Sunda	36.701.670 jiwa
3.	Batak	8.466.969 jiwa
4.	Madura	7.179.356 jiwa
5.	Betawi	6.807.968 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Indonesia adalah negara yang berkeyakinan kepada Tuhan yang maha esa sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Indonesia merupakan negara dengan penganut agama islam terbesar di dunia.

Tabel 1.3
Negara dengan Jumlah Penganut Agama Islam Terbesar Di Dunia

No.	Negara	Jumlah Penganut Agama Islam
1.	Indonesia	207.20 juta jiwa
2.	Pakistan	194.72 juta jiwa
3.	India	179.89 juta jiwa
4.	Bangladesh	139.16 juta jiwa
5.	Nigeria	93.04 juta jiwa

Sumber: CIA World Factbook. 2015

Salah satu wilayah dengan penganut agama islam terbesar di Indonesia adalah pulau Madura. Pulau Madura memiliki jumlah penduduk 7,8 juta jiwa dengan persentase penganut agama islam sekitar 99% (BPS, 2015). Menurut Jonge (1990:29) masyarakat Madura adalah Islam dan cerminan kultural agama Islam tradisional di Indonesia. Pemandangan desa yang harmonis dan pola hubungan beragama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti *yasinan*, tradisi *arebbe*, *rokat tase'* dan memperingati *haul* ulama besar. Potret kuatnya agama Islam di Madura juga terlihat dari adanya mushola (*langgar*) di setiap rumah dan juga terdapat sekurang-kurangnya satu masjid di setiap desa. Posisi berdirinya masjid biasanya terletak berdekatan dengan sarana pendidikan Islam (pesantren) yang dipimpin oleh tokoh agama Islam, sehingga masjid selalu ramai dan agama Islam nampak sangat hidup. Tokoh agama Islam umumnya disebut dengan Ulama, namun di daerah Jawa dan Madura tokoh agama Islam disebut dengan “Kiai” (Teba, 1988). Menurut Dhofier (1986:55) kiai adalah pemimpin sebuah pesantren yang mengajarkan kitab-kitab kuning dan dituakan di lingkungannya. Kiai memiliki sifat kharismatik dalam berdialog dan dipercaya dapat memberikan jalan yang terang bagi semua umat manusia.

Kultur di dalam masyarakat Madura yaitu adanya dua tokoh pemimpin informal yaitu kyai dan tokoh *blater*. Kyai merupakan cerminan dari kekuatan agama Islam di Madura sedangkan tokoh *blater* merupakan cerminan dari watak keras dan santun masyarakat Madura. Terdapat sebuah budaya yang menjadi identitas masyarakat Madura yaitu “*Bhuppa’ Bhabbhu’ Ghuru Rato*” yang memiliki makna “bapak, ibu, guru dan penguasa (pemerintah)” (Hefni, 2007:4). Identitas tersebut merupakan bentuk hirarki kepatuhan masyarakat Madura dengan kepatuhan pertama kepada kedua orang tua (bapak dan ibu), kemudian kepada guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan yang terakhir kepada pemerintah. Kepatuhan kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban mutlak namun persoalannya terletak pada kepatuhan terhadap guru. Masyarakat Madura umumnya lebih terkonsentrasi kepada pendidikan agama daripada pendidikan formal lainnya. Masyarakat Madura belum tentu tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD) tetapi mereka telah mengenyam pendidikan di pesantren atau tingkatan terendahnya adalah Madrasah *Ibtidaiyah* (MI) (Hefni, 2007:43). Fakta dan realita yang sedemikian rupa membuat kedudukan Kiai menjadi sangat dihormati dan menjadi panutan serta suri tauladan bagi masyarakat Madura. Setiap orang tua akan merekomendasikan putra putrinya untuk menempuh pendidikan agama di tempat yang sama dengan orang tuanya sehingga tanpa disadari Kiai telah memperkuat posisinya di masyarakat.

Kuatnya pengaruh Kiai di dalam masyarakat Madura menyebabkan Kiai berada diposisi puncak strata sosial masyarakat dan menjadi sosok pemimpin informal di dalam masyarakat. Setiap fatwa dan tindakan akan selalu diawasi oleh

masyarakat dan akan dicontoh oleh masyarakat, meskipun terkadang tindakan yang dilakukan Kiai belum tentu benar. Merambahnya Kiai ke sektor pemerintahan akan membuat kedudukan Kiai di dalam masyarakat menjadi semakin kuat. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa sosok Kiai adalah sosok yang bersih, jujur dan kuat dalam agama (Suprayogo, 2009:34), sehingga masyarakat sangat percaya bahwa Kiai tidak akan membohongi umat (masyarakat) dan juga tidak akan melakukan korupsi. Kepercayaan masyarakat Madura terhadap Kiai tampak lebih tinggi daripada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak memiliki latar belakang Kiai. Hal ini terjadi karena umat (masyarakat) lebih fanatik dan percaya terhadap fatwa Kiai daripada sekedar himbauan dari pemerintah. Sisi positif masuknya Kiai ke dalam struktur pemerintahan menyebabkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena himbauan pemerintah juga dianggap sebagai fatwa Kiai.

Inilah kelemahan kultur sosial masyarakat Madura mengingat gelar Kiai sangat mudah diperoleh. Tolak ukur “kebesaran” kiai di Madura dapat ditinjau dari seberapa banyak jumlah santri yang dimiliki (Jonge, 1988:38), jika sudah demikian maka Kiai tersebut akan dihormati hingga tujuh turunan. Keturunan Kiai besar secara otomatis akan mendapat gelar *lora* yang berarti keturunan Kiai dan apabila telah melaksanakan ibadah haji maka gelarnya akan berubah menjadi Kiai Haji (KH), meskipun ilmu yang dimiliki belum tentu sebanding dengan pendahulunya. Cara lainnya untuk memperoleh gelar kiai yaitu dengan membuat pondok pesantren meskipun ilmu yang dimiliki masih dalam level yang rendah. Saat ini fungsi pondok pesantren bukan hanya sarana pembelajaran ilmu agama

namun juga berfungsi sebagai ajang “menjual nama” para kiai untuk menarik popularitas guna masuk ke dunia politik (Suprayogo, 2009:69), sehingga bisa dibayangkan jika gelar kiai yang dimiliki oleh pejabat publik merupakan gelar turunan atau gelar yang tidak sebanding dengan ilmu agama yang dimiliki. Akibatnya kebijakan yang dibuat akan menyimpang dari cita-cita masyarakat yaitu *rahmatat lil alamin*.

Fanatisme yang berlebihan terhadap status kiai membuat tampuk kekuasaan di Pulau Madura dipegang penuh oleh kekuasaan kharismatik yaitu Kiai atau keturunan Kiai. Pulau Madura terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang semuanya dipimpin oleh trah (keturunan) Kiai. Kabupaten Bangkalan saat ini dipimpin oleh Makmun Ibnu Fuad yang merupakan putra dari mantan Bupati Bangkalan KH. Fuad Amin Imron sekaligus keturunan dari ulama besar yaitu Syaikhona Mohammad Kholil. Kabupaten Sampang saat ini dipimpin oleh Fadhillah Budiono yang sebelumnya menjabat wakil Bupati Sampang, Fadhillah menggantikan posisi Bupati Sampang KH. Fannan Hasib yang meninggal dunia. Kabupaten Pamekasan juga dipimpin oleh keturunan lama yaitu KH, Achmad Syafii sedangkan Kabupaten Sumenep juga dipimpin oleh kiai yaitu KH, Busryo Karim (maduracorner.com). Hal ini menjadi masalah tersendiri sebab sejak zaman orde lama penguasa Madura selalu bergelar ulama tetapi hingga saat ini Pulau Madura masih tetap kering dan tandus.

Saat ini Pulau Madura menjadi sorotan karena pembangunan daerahnya yang masih tertinggal di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 menguk

sebuah fakta bahwa Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang termasuk daerah yang masih tertinggal di Indonesia. Pembangunan program megapolitan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang digadang-gadang akan menjadi megapolitan kedua di Indonesia setelah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ternyata masih belum mampu menginspirasi pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Program megapolitan Gerbangkertosusila tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meletakkan Kabupaten Bangkalan sebagai pengemban tugas untuk menyokong Kota Surabaya dibidang pelabuhan peti kemas, bandara dan sektor industri berbasis pertanian, namun hingga saat ini pembangunan industri yang difokuskan di daerah Tol Suramadu masih nihil.

Pembangunan jembatan Suramadu yang diharapkan dapat membuka jalan bagi Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura untuk berbenah, namun kenyataannya jembatan Suramadu belum efektif dalam mempercepat laju pembangunan daerah, padahal jarak antara Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya hanya 5 kilometer dengan estimasi waktu 10 menit melalui jembatan Suramadu, bandingkan dengan penggunaan kapal feri yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Jika ditinjau dari estimasi jarak dan waktu, seharusnya Kabupaten Bangkalan menjadi daerah termaju di Pulau Madura. Adanya jembatan Suramadu justru mempercepat laju urbanisasi dari wilayah madura menuju kota besar di pulau Jawa terutama Kota Surabaya, akibatnya cita-cita awal

pembangunan Suramadu yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan belum tercapai.

Permasalahan di Kabupaten Bangkalan semakin terbuka setelah mantan Bupati Bangkalan dua periode (2003-2013) dan juga ketua DPRD Bangkalan periode 2013-2018 yaitu KH. Fuad Amin Imron terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KH. Zainal Abidin, tokoh agama di Kabupaten Bangkalan berjumlah 60 orang namun masalahnya adalah gagalnya tokoh agama menjadi agen perubahan (*agent of change*) karena tidak semua tokoh agama diberi wewenang dalam proses pembangunan (wawancara, 23 Desember 2017). Jika ditelaah lebih jauh maka prinsip *good governance* belum dilaksanakan dengan baik terutama prinsip keadilan dan prinsip berwawasan ke depan (*strategy vision*). selain itu tokoh agama merupakan salah satu aktor pembangunan yang sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.

Belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* ditambah kuatnya salah satu aktor pembangunan menyebabkan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan masih belum optimal. Realita tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran tokoh agama sebagai aktor dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*?
2. Bagaimanakah hubungan antar aktor dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa peran tokoh agama sebagai aktor dari perspektif *good governance* dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa hubungan antar aktor dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru bagi keilmuan sosial terutama pada ilmu administrasi publik (negara) mengenai *good governance* dan pembangunan daerah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dalam menganalisa dinamika politik tokoh agama dan pengambilan keputusan dalam membangun daerah di era reformasi dan globalisasi
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan semua pembaca bahwa teori hanyalah kalimat dan belum tentu efektif jika diterapkan di lingkungan yang berbeda.
2. Manfaat Praktis
- a. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat mengubah paradigma kehidupan masyarakat Kabupaten Bangkalan ke arah yang lebih baik sehingga stakeholder pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat berbenah, akademisi dapat disesuaikan porsinya dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bangsa dan negara serta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang mengenai latar belakang penelitian peran kiai dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan dalam perspektif *good governance*, rumusan masalah dan juga

tujuan penelitian, serta manfaat teoritis dan praktis. Fungsi bab ini adalah untuk mengetahui acuan utama dan tolak ukur adanya sebuah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data, dan interpretasi data mengenai peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan dalam perspektif *good governance*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan yaitu temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penelitian serta saran-saran terkait dengan hasil penelitian yang selanjutnya agar dapat berkontribusi bagi para akademisi maupun praktisi yang ingin mengetahui atau berkeinginan untuk menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *public administration*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata publik didefinisikan sebagai umum dan masyarakat. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2008 dalam Syafri, 2012:9). Administrasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi antar individu atau kelompok untuk menjalankan sebuah kebijakan (Prethus, 1990 dalam Syafri, 2012:20). Menurut Rosenbloom dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif dan eksekutif dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat secara menyeluruh atau sebagian.

Henry (dalam Pasolong 2012:56) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan pelaksanaan pembangunan

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, administrasi publik merupakan kerjasama antar lembaga pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat dalam menyukseskan segala bentuk program dan kebijakan negara

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup administrasi publik menurut Inu Kencana Syafii (1999:29), menguraikan ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

- a. Di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan, meliputi: administrasi pemerintahan pusat, administrasi pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan kota administratif, administrasi departemen, administrasi non-departemen.
- b. Di bidang kekuasaan, meliputi: administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik, administrasi kebijaksanaan pemerintah.
- c. Di bidang kekuasaan, meliputi: administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik, administrasi kebijaksanaan pemerintah.
- d. Di bidang kenegaraan, meliputi: tugas dan kewajiban negara, hak dan kewenangan negara, tipe dan bentuk negara, fungsi dan prinsip negara, unsur-unsur negara, tujuan negara dan tujuan nasional.
- e. Di bidang pemikiran hakiki, meliputi: etika administrasi publik, logika administrasi publik, hakikat administrasi publik.
- f. Di bidang ketatalaksanaan, meliputi: administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kemiliteran, administrasi kepolisian, administrasi perpajakan, administrasi pengadilan, administrasi perusahaan.

Menurut Pasolong (2012:68) penjelasan ruang lingkup administrasi publik di era globalisasi mengerucut kepada pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan pembangunan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan meliputi pertimbangan terhadap alternatif dan resiko dalam memutuskan sebuah permasalahan. Pengambilan keputusan di negara demokrasi dilakukan oleh seorang pemimpin dengan memperhatikan asas keterbukaan dan partisipatif sehingga pengambilan keputusan tidak berdasarkan pada egoisme semata.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berkaitan dengan segala bentuk tindakan nyata pemerintah yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Implementasi kebijakan merupakan sebuah kelanjutan dari pengambilan keputusan yang terkonsep dalam sebuah perencanaan. Implementasi kebijakan juga memperhatikan kondisi alam dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki.

c. Pembangunan

Pembangunan merupakan keseluruhan aktifitas pemerintah untuk perubahan yang lebih baik. Pembangunan haruslah memiliki tujuan yang jelas dan terencana sehingga menghasilkan sebuah pembangunan yang bermanfaat bagi banyak orang. Pembangunan harus ditunjang dengan kesiapan dan dukungan semua sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan durasi yang diberikan dan dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Siagian (2005:9) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Bryan dan White (dalam Suryono, 2010:2) definisi pembangunan adalah upaya meningkatkan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*);
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*);
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya, kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*);
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara yang lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan dan menghormati (*interdependence*).

Lima prinsip dasar dari pembangunan di atas harus berorientasi pada pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang mengandung arti adanya proses pembangunan dengan tujuan peningkatan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya. Sehingga pembangunan merupakan langkah nyata dari sebuah masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, Suryono (2010:4) mengatakan dalam pembangunan (*development*) terdapat unsur-unsur:

- a. Perubahan: yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan.
- b. Tujuan: yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik.
- c. Potensi: yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan

Menurut Undang Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan nasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, trotoar dan bendungan yang memiliki sifat mudah diukur dan prosesnya berlangsung singkat. Pembangunan nonfisik merupakan pembangunan tak kasat mata namun nyata dan cenderung bersifat sulit untuk diukur serta memiliki proses yang panjang seperti pembangunan sosial, pembangunan politik, pembangunan hukum dan pembangunan budaya.

Untuk tercapainya pembangunan yang optimal maka diperlukan keseimbangan dalam pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Untuk itu pemerintah mengeluarkan regulasi yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2007

pasal 8 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pembangunan di Indonesia sudah di-*breakdown* ke tingkat daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional. Atas dasar pengertian pada konsep-konsep pembangunan di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan

2. Pembangunan Daerah

Menurut Sukirno (2002) mendefinisikan pembangunan daerah sebagai suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal mendefinisikan pembangunan daerah sebagai tindakan, upaya dan proses terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan integral dari pembangunan nasional. Jadi pembangunan daerah bersifat terencana dengan mempersiapkan segala bentuk skenario untuk keberhasilan pembangunan daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah untuk pemeratakan pembangunan nasional sebab saat ini pembangunan nasional bersifat jawa-sentris yaitu pembangunan yang berpusat di daerah pulau Jawa. Untuk itu langkah-langkah pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik dengan melibatkan semua aktor yang terlibat hingga diputuskan sebuah kebijakan yang siap untuk

dieksekusi (implementasi). Pembangunan daerah masih terus berlanjut dari segi evaluasi yang menyeluruh dimulai dari perencanaan hingga pembangunan selesai. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kreasi, warna dan juga keindahan corak yang sesuai dengan imajinasi dan pola hidup dari daerah tersebut.

Menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2010:46) menyimpulkan bahwa pembangunan memiliki tahap-tahap perkembangan dan jika telah sampai pada level *cultural development* maka tahapan tersebut adalah pembangunan daerah. Pembangunan daerah juga harus bersifat spesifik, kultural dan memiliki ciri khas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah memiliki sifat kultural yang menjadi prioritas dan rencana pembangunan. Pembangunan daerah diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang unik, eksentrik dan indah dipandang serta bermanfaat untuk masyarakat. Untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan kerjasama semua pihak dan faktor-faktor lain yang menjadi *key player* dalam pembangunan daerah.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan Daerah

Pentingnya pembangunan daerah tidak lepas dari keinginan untuk perubahan yang lebih baik, sehingga diperlukan keberhasilan dalam pembangunan daerah. Menurut Colfer dan Capistrano (2005) menyebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi penentu dalam keberhasilan pembangunan daerah yaitu potensi alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kepemimpinan. Faktor-faktor tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Potensi Alam

Daerah yang memiliki potensi alam melimpah cenderung menjadi daerah yang lebih cepat melaksanakan pembangunan. Potensi alam sendiri bukan hanya barang tambang semata tetapi juga letak, suhu dan juga keanekaragaman hayati. Untuk itu diperlukan sebuah mapping yang menyeluruh untuk menentukan prioritas potensi alam yang dimiliki dengan harapan potensi alam tersebut memberikan manfaat dalam menyejahterakan masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang baik tentu akan selalu berinovasi untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Potensi alam akan menjadi sia-sia jika tidak ada SDM yang berkualitas dalam memanfaatkan potensi alam tersebut. Selain itu SDM yang inovatif tentu akan mengolah potensi alam yang tersedia menjadi barang yang multiguna.

c. Teknologi

Kecanggihan teknologi membuat pembangunan daerah menjadi berbasis elektronik yang semuanya terhubung di aplikasi dalam jaringan (*online*) selain itu, teknologi juga berperan dalam memudahkan segala aktifitas manusia. Teknologi juga akan membantu proses pembangunan terutama dalam faktor durasi pembangunan dan biaya yang harus dikeluarkan.

d. Kepemimpinan

Kepemimpinan disini terkait kepada keberanian pemimpin mengambil keputusan dalam pembangunan. Pemimpin akan menjadi sebuah ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan. Pemimpin harus bersifat *out of the*

box yaitu berani menantang arus untuk perubahan yang lebih. Pemimpin haruslah konsisten terutama dalam situasi genting sehingga pemimpin tidak mudah terbawa perasaan (baper) yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam bertindak. Pemimpin merupakan aktor utama dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kesuksesan pembangunan. Jika di analogikan maka sumber daya alam yang melimpah tidak akan berguna secara optimal jika pemimpinnya tidak mau memanfaatkan, lalu SDM yang hebat akan menjadi sia-sia jika pemimpin tidak mengualarkan regulasi untuk pemberdayaan, dan juga teknologi canggih tidak akan berguna jika pemimpin tidak bisa mengoperasikannya. Oleh sebab itu pemimpin menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Keempat faktor tersebut harus memiliki sinkronisasi yang jelas terutama di faktor kepemimpinan. Selain itu memperhatikan faktor-faktor diatas pemimpin juga harus memperhatikan hubungan dengan pihak lain (pihak ketiga) dan masyarakat guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

C. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good governance jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti tata kelola pemerintahan yang baik. Lipchack dalam Hakim (2013:10) mendefinisikan *good governance* sebagai fungsi pemerintah yang bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Tjokroamidjojo (2001:1) mendefinisikan *good*

governance sebagai tata kelola pemerintah yang bisa memerintah, menguasai, mengurus dan mengelola. Konsep *good governance* secara tersirat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Basuki, Anton dan Shofwan (2006:9) mendefinisikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, swasta dan masyarakat. Sumartono dalam Hakim (2013:12) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan mekanisme praktik dan tata cara pemerintah serta masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah publik. Pada pelaksanaan *good governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Peran pemerintah yang dahulu menjadi penyedia jasa pelayanan sedangkan saat ini peran pemerintah bergeser menjadi pendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan saling bersinergi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan praktik penyelenggaraan negara yang lebih

efektif dan efisien serta bertanggung jawab dalam sinergisitas dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Keterlibatan para *stakeholder* dapat memberikan sebuah kenyamanan dalam pembangunan baik dari segi perencanaan, implementasi maupun evaluasi sehingga praktik pengambilan keputusan tidak semua (murni) ditangan pemerintah. Adanya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat terbawah pemerintahan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak lagi apatis dan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan negara.

2. Aktor *Good Governance*

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) aktor dalam good governance menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Basuki, Anton dan Shofwan (2006:10) yaitu negara/pemerintah (*state*), swasta (*privat*) dan masyarakat madani (*civil society*). Masing-masing aktor memiliki peran penting dalam *good governance* yaitu :

- a. Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan serta pemberi kestabilan politik, hukum, dan ekonomi. Pembuatan kebijakan yang dimaksud bukan berarti pemerintah menjadi subjek tunggal namun, pembuatan kebijakan merupakan hasil pola pikir bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, pemerintah menjadi aktor yang mengesahkan sebuah kebijakan. Pengendalian dan pengawasan lebih berfokus kepada lembaga negara yang bersifat independen seperti pengawasan ijin usaha dan pengawasan keuangan.

- b. Swasta lebih banyak bergerak dalam aktifitas ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup serta penciptaan lapangan pekerjaan. Aktifitas ekonomi yang dimaksud adalah penyediaan serta distribusi barang dan jasa. Pelestarian lingkungan hidup meliputi aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan juga aktifitas pemulihan hutan lindung. Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan usaha untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi beban negara.
- c. Masyarakat madani merupakan sebuah subjek sekaligus objek dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta, hal ini terjadi karena didalam masyarakat banyak interaksi politik, pembangunan, ekonomi dan sosial budaya. Masyarakat madani merupakan institusi pengawas non formal yang akan bertindak jika pemerintah dan swasta melakukan penyelewengan dan ketidak terbukaan.

Pembagian aktor diatas menjadi bukti praktik demokratisasi telah berjalan dengan pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan fungsinya. Tantangan utama dari adanya tiga aktor tersebut adalah bagaimana ketiga aktor tersebut bekerja sama tanpa adanya kepentingan tersembunyi (*hidden interest*) baik dari oknum tertentu maupun dari kelompok kepentingan, hal ini dapat merusak tujuan utama dari *good governance* yang diimplementasikan dalam prinsip-prinsip *good governance*.

3. Prinsip Good Governance

Menurut UNDP dalam Renyowijoyo (2010) prinsip-prinsip *good governance* meliputi 8 (delapan) prinsip yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi,

responsifitas, berwawasan kedepan, akuntabilitas, keadilan dan efektif efisien. yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Partisipasi

Mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

b. Penegakan Hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum haruslah bersifat terbuka terutama kasus-kasus yang menjerat elit politik dan elit massa.

c. Transparansi

Menciptakan kepercayaan masyarakat dengan penyediaan informasi publik yang mudah diakses. Informasi publik meliputi keuangan daerah, program kerja dan juga proses izin usaha.

d. Responsifitas

Kecepatan dan ketanggapan pemerintah dalam menghadapi sebuah kasus serta keluhan dari masyarakat. Pemerintah yang responsif dapat menjadi sebuah cara untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sehingga timbullah rasa saling menyayangi dan saling menghargai yang akan berakibat kepada hubungan timbal balik masyarakat dalam membantu setiap program kerja pemerintah.

e. Berwawasan Kedeapan

Mengembangkan daerah dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) guna menciptakan pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya..

f. Akuntabilitas

Meningkatkan tanggung jawab para pengambil keputusan dimulai dari tingkat terendah. Akuntabilitas merupakan kewaiban tanggung jawab dari setiap tindakan.

g. Keadilan

Praktik keadilan yang baik yaitu pemberian kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk menciptakan keadilan diperlukan sebuah keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

h. Efektif dan Efisien

Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara tepat guna (efisien) dan hasil guna (efektif). Efektif lebih kepada bagaimana hasil dari pengelolaan sumberdaya atau pembangunan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Efisien merupakan pemnafaatan sumber daya baik tenaga, materi maupun finansial sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi pemanfaatan yang berlebihan dan sia-sia (mubadzir).

.

D. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran (*role*) dalam KBBI memiliki arti sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat. Menurut Dougherty dan Pritchard dalam Soekanto (2014:208) peran merupakan kerangka konseptual dalam berperilaku didalam organisasi dan juga melibatkan dalam pembuatan produk baik sebagai kawan (petahana) maupun sebagai lawan (oposisi). Sukanto (2014:210). Mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah melakukan peran

Levinson dalam Soekanto (2014:213) mendeskripsikan peran dalam tiga cakupan yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau kedudukan seseorang didalam masyarakat atau organisasi
- b. Peran merupakan konsep tentang apa kontribusi individu dalam kelompok atau masyarakat
- c. Peran dianggap penting dalam struktur sosial karena setiap individu memiliki peran yang berbeda

Ketiga cakupan tersebut tampak saling melengkapi karena peran merupakan aksi individu sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi). Soekanto (2014:242) membagi peran menjadi 3 (tiga) jenis yaitu

- a. Peran Aktif
Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok yang umumnya ditempati oleh figur penting seperti pemimpin lembaga, kepala bagian dan pejabat penting lainnya
- b. Peran Pasif
Peran pasif merupakan peran yang tidak mau ikut campur didalam organisasi, bisa dikatakan pemilik peran tidak menggunakan hak dan kewajibannya.

c. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan pemberian peran kepada struktur organisasi akar rumput atau biasa disebut simpatisan

Ketiga jenis peran diatas merupakan pandangan umum terhadap sebuah organisasi masyarakat, namun pembagian jenis peran dapat dilihat juga didalam kelompok. Jadi ketiga jenis peran merupakan pandangan umum terhadap pembagian peran tanpa memandang jenis organisasi (formal dan nonformal).

Semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin disorot juga perannya. Hal ini berlaku juga pada pemimpin, masyarakat akan selalu mengawasi tingkah laku, tutur kata dan segala macam bentuk aktifitasnya baik dari segi pekerjaan maupun segi pergaulan. Sisi pekerjaan tersebut meliputi segala tindakan yang ada pada dunia kerja, misalnya kepala daerah dengan kebijakannya ataupun kepala sekolah dengan sikap teladannya. Oleh sebab itu peran pemimpin merupakan peran yang paling disorot dalam setiap kegiatan termasuk pembangunan.

2. Peran Pemerintah (Pemimpin Formal) Dalam Pembangunan

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI, 2009) mendefinisikan Pemerintah sebagai pemimpin daerah atau pemimpin lembaga atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah disebut juga dengan pemimpin formal (*formal leader*). Menurut Siagian (2005:142) pemerintah (dalam hal ini disebut pemimpin formal) memiliki fungsi dalam pembangunan yaitu :

- a. Fungsi stabilisator, yaitu pemerintah harus bisa menjadi penyeimbang sehingga masalah dapat segera terselesaikan.
- b. Fungsi inovator, yaitu pemerintah sebagai perencana pembangunan yang inovatif dan kreatif.

- c. Fungsi modernisator, yaitu pemerintah sebagai pelaksana pembangunan harus memiliki konsep pembangunan yang berorientasi kepada masa depan.
- d. Fungsi pelopor, yaitu pemerintah sebagai suri tauladan dan panutan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- e. Fungsi pelaksanaan, yaitu pemerintah harus bisa bersinergi dengan pihak lain dalam melaksanakan pembangunan

Peran pemimpin formal bersifat aktif sebab pemimpin formal merupakan “kepanjangan” tangan dari Tuhan untuk melakukan perubahan. Pemimpin formal memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan juga memiliki jenjang karir yang jelas serta berbanding lurus dengan pendidikan formal. Pemimpin formal memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) secara jelas sehingga apabila melanggar maka sanksi hukum menjadi ancaman.

3. Peran Pemimpin Informal Dalam Pembangunan

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI, 2009) mendefinisikan pemimpin informal sebagai individu yang memiliki kedudukan kuat di masyarakat. Kedudukan kuat disini meliputi kharisma, wibawa, dan juga faktor ketakutan dalam diri masyarakat. Pemimpin informal berperan pasif-partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan. Pemimpin informal berperan pasif ketika menerima pembangunan tanpa adanya musyawarah dengan pihak pemerintah (*formal leader*). Ketika pemimpin informal berdiskusi dengan pemerintah dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan maka pemimpin informal telah bertindak sebagai partisipan. Pemimpin informal tidak memiliki tupoksi yang jelas, tidak mempunyai karir yang sesuai dengan pendidikan serta tidak memiliki hirarki organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang menggambarkan fenomena sosial secara terperinci. Menurut pengertian yang diberikan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap pengamatan fakta yang telah dan berhasil dilihat.

Penelitian deskriptif menjadi pilihan peneliti karena tujuan peneliti yaitu ingin melihat fenomena secara nyata di lapangan mengenai peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan secara mendalam ditinjau dari perspektif *good governance*. Peneliti menganggap pendekatan kualitatif akan cocok dengan fokus penelitian dan kondisi lapangan yang akan memudahkan proses penelitian ini. Peneliti juga akan memaparkan fenomena yang ada di lapangan dengan menyandingkan, membandingkan dan menandingkan bersama teori- teori yang dianggap mendukung serta dokumen terkait untuk menyukseskan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi penelitian. Dengan menentukan fokus penelitian, peneliti tahu data mana dan data apa yang harus dipilih, dipilah, dibuang, dan digunakan sesuai relevansi penelitian. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya (Moleong, 2012). Setelah melihat latar belakang dan kajian teori yang digunakan maka fokus penelitian ini adalah :

1. Peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*
 - a. Pengambilan Keputusan
 - b. Pembangunan Infrastruktur
 - c. Pembangunan Sosial
2. Hubungan antar aktor dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut pengertian yang diungkapkan oleh Moleong (2012), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam menentukan lokasi peneliian, cara terbaik yang dapat ditempuh peneliti yaitu dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dengan menjajaki

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena kompleksitas masalah pembangunan dan kuatnya pengaruh pola kepemimpinan kharismatik yang masih belum bisa menyejahterakan masyarakat Bangkalan terlebih dalam era *good governance*.

Sementara itu, yang dimaksud dengan situs penelitian adalah menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari objek atau fenomena yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai fokus penelitian dapat diperoleh (Sugiyono, 2011). Situs penelitian ini adalah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan dan pesantren.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data, informasi penting dan fenomena yang dapat mendukung penelitian. Menurut Sugiyono (2011), sumber data penelitian kualitatif adalah sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Berdasarkan jenis penelitian ini, secara umum terdapat dua klasifikasi data yaitu:

1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan cara mengamati, mencatat dan mewawancarai langsung pihak yang berkaitan dengan tokoh agama dan *good governance* yang menjadi subjek penelitian dan menguasai permasalahan yang diteliti atau informan kunci (*key informan*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan yakni Bapak Winardi, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangkalan yakni Bapak Eko, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangkalan yakni KH. Zainal Abidin, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yakni KH. Mukaffi Kholil, Kepala TU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni Ibu Mahmudah, Kepala TU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yakni Ibu Diana, Koordinator Kejuruan Otomotif Balai Latihan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yakni Bapak Kholid Ibrahim, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam yakni KH. Nuruddin Arrahman, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah yakni KH. Jauhari Aris, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa yakni KH. Mukhlis Alkomi, Sekretaris Klenteng Eng An Bio yakni Ibu Yuyun, Pemimpin Gereja Katolik Santa Maria Fatima Bangkalan yakni Romo Eli dan Pemimpin Gereja Pantekosta yakni Pendeta Zefanja Walujo. Untuk data primer lainnya diperoleh dari hasil observasi lapangan secara langsung yang dapat dilihat pada halaman 56, 58, 63, 66, 83

2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dan agar menjadi informasi, Sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan dokumen terkait yang terdiri dari
 - a) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025
 - b) Dokumen Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Bangkalan Tahun 2017
 - c) Dokumen Jumlah Agama di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016

- d) Dokumen Profil Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Bangkalan 2016
- e) Dokumen Hiring oleh anggota DPRD yaitu KH. Mukaffi Kholil 2017
- f) Dokumen Deklarasi “Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat” 2017
- g) Dokumen Permohonan Bantuan Pendanaan Keagamaan 2017
- h) Dokumen Kerjasama UPT Balai Latihan Kerja 2017
- i) Dokumen Investasi di Kabupaten Bangkalan 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan masing-masing teknik akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) dengan informan, yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara. Penelitian ini juga menilai kebenaran jawaban yang diberikan dan memberi penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan mengenai peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.

- a) Sekretaris Bappeda Kabupaten Bangkalan (Bapak Winardi)
- b) Kaur Kesra Kabupaten Bangkalan (Bapak Eko)
- c) Ketua Umum FKUB Kabupaten Bangkalan (KH. Zainal Abidin)
- d) Kepala TU Dinas PUPR (Ibu Mahmudah)

- e) Kepala TU Dinas PRKP (Ibu Diana)
- f) Koordinator Jurusan Mesin UPT BLK Bangkalan (Bapak Kholid)
- g) Tokoh Agama Islam (KH. Mukhlis Alkomi, KH Jauhari Aris, KH Nuruddin Arrahman)
- h) Tokoh Agama Kong Hu Chu (Ibu Yuyun)
- i) Tokoh Agama Katolik (Romo Eli)
- j) Tokoh Agama Kristen (Pendeta Zefanja Walujo)

2. Observasi

Observasi adalah suatu studi yang sengaja dilakukan dengan sistematis yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial dan gejala psikis melalui jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi peneliti berlangsung pada bulan Desember 2017 hingga bulan Januari 2018. Adapun data yang diperoleh dari hasil observasi dapat dilihat pada halaman 56, 58, 63, 66, 83 dan lampiran 2

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara sekunder dengan cara mencatat langsung data yang tersedia pada sumber data penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini dapat dilihat pada halaman 53, 54, 57, 62, 70.

F. Instrument Penelitian

Menurut Moleong (2012) bahwa “kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, karena sekaligus sebagai perencana, pelaksana,

pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian”. Dengan demikian, instrumen penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti sendiri

Peneliti mengamati fenomena-fenomena dan melakukan wawancara dengan kelompok sasaran yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara berupa materi-materi atau poin-poin yang menjadi acuan dan dasar dalam melakukan wawancara tersebut dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terkait dengan peran tokoh agama dalam pembangunan daerah ditinjau dari perspektif *good governance*. selanjutnya permasalahan yang ditemukan di dalamnya dijadikan acuan bagi peneliti untuk memberikan sumbangan pemikiran atau saran.

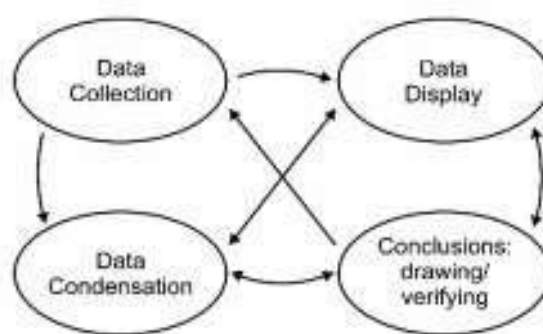
3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang dalam penelitian ini berupa *field note* atau catatan lapangan, alat tulis yang dibutuhkan, *recorder*, kamera, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan catatan lapangan untuk mencatat informasi yang terkait dengan peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten

Bangkalan dalam perspektif *good governance* Informasi ini akan di dapatkan melalui wawancara dan observasi. Selain itu, kamera dan *recorder* juga digunakan sebagai alat penelitian untuk mempermudah pengumpulan informasi dari narasumber atau informan.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bigdan dan Biklen dalam Moleong (2012), adalah “Upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014;31). Pemilihan model interaktif dianggap cocok karena memiliki 4 (empat) tahapan dalam analisis kualitatif yaitu *data collection*, *data condensation* dan *data display* serta *conclusion (verification)*



Gambar 1: Model Hubungan Interaktif Miles, Huberman, Saldana
 Sumber : www.google.com diakses pada 15/11/17

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data collection adalah proses pengumpulan data yang berkaitan dengan topik bahasan sesuai dengan kebutuhan atau pada level titik jenuh. Sehingga data yang diperoleh memiliki akurasi data yang mendalam.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah tahapan pemilihan data, penyederhanaan data dan mentransformasikan data sesuai kategori yang dibutuhkan sehingga data akan menjadi jelas dan terperinci serta akan memudahkan peneliti dalam melanjutkan penelitiannya

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam model interaktif meliputi penguaraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori yang ada sehingga akan menimbulkan hubungan antar masing-masing kategori. Penggunaan *flowchart*, bagan dan tabel untuk mempermudah penyajian data selama proses penelitian.

4. Kesimpulan (*Conclusion/ Verification*)

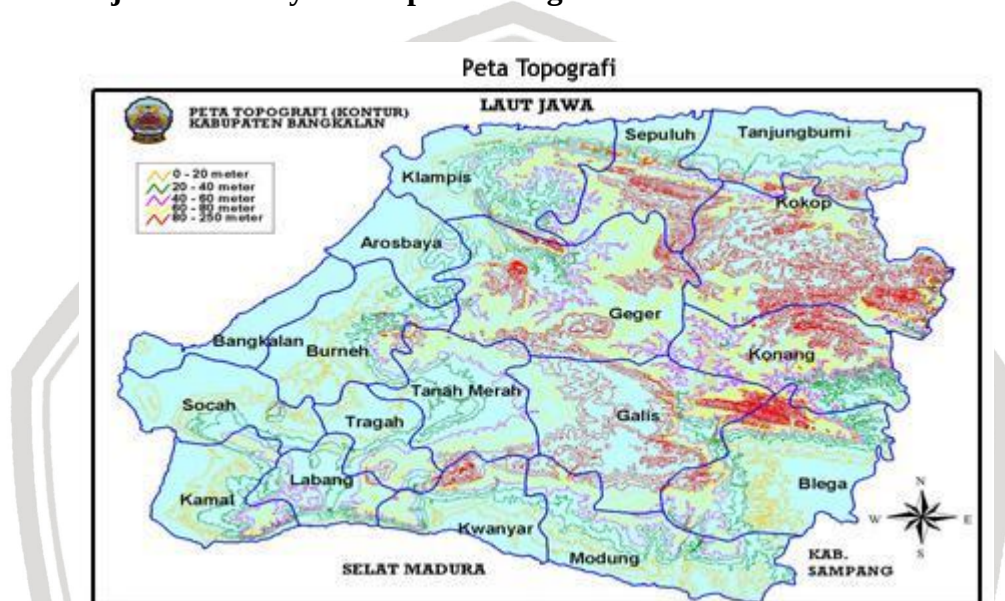
Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam analisis data model interaktif. Penarikan kesimpulan akan menjawab masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan juga menjadi instrumen jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus hingga penelitian selesai sebab fenomena di lapangan dapat berubah dengan cepat terutama dalam penelitian ini yang sedikit berbau politik yaitu peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan dalam perspektif *good governance*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan

1. Sejarah Lahirnya Kabupaten Bangkalan



Gambar 2: Peta Kabupaten Bangkalan

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025) 2018

Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan dan diyakini oleh masyarakat secara luas, asal mula penamaan Bangkalan berawal dari dua kata yaitu “*bangkah*” yang berarti mati dan “*laan*” yang berarti sudah sehingga kata Bangkalan memiliki arti mati sudah. Penamaan Bangkalan berawal dari pemberontakan besar yang dilakukan oleh Ke’ Lesap dalam melawan kerajaan Madura yang bersekongkol dengan VOC. Lesap merupakan anak dari raja Madura yang bernama Tjakraningrat IV, namun Lesap tidak diakui karena Lesap lahir dari istri selir Tjakraningrat IV. Lesap besar dari didikan islam yang sangat

kuat dan dianugerahi kekuatan spritual ilmu kebal. Lesap disebut sebagai Pangeran Gunung Geger karena Lesap sering bertapa Gunung Geger tersebut. Singkat cerita Lesap mampu mengalahkan Tjakraningrat IV dan VOC sehingga memaksa Tjakraningrat IV mengungsi ke Mataram. Momentum inilah pendukung Lesap meneriakkan kalimat “*bangkah laan*” yang seiring berjalannya waktu kalimat tersebut berubah menjadi sebuah kata yaitu Bangkalan.

Bangkalan disahkan menjadi sebuah kabupaten pada rezim orde lama menyusul deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bupati yang menjabat secara resmi setelah Indonesia merdeka adalah Mr. R.A Mochammad Sis Tjakraningrat. Berikut ini daftar pemimpin daerah di Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan:

- Bupati Bangkalan ke-1 : Pangeran Adiningrat (1882-1905) *Pra kemerdekaan setelah kerajaan dibubarkan oleh Belanda
- Bupati Bangkalan ke-2 : R.A.A Suryonegoro (1905-1918) *Pra kemerdekaan setelah kerajaan dibubarkan oleh Belanda
- Bupati Bangkalan ke-3 : R.A A Suryo Winoto (1918-1948) *Pra kemerdekaan setelah kerajaan dibubarkan oleh Belanda
- Bupati Bangkalan ke-4 : R.A Moh. Sis Cakraningrat (1948-1956)
- Bupati Bangkalan ke-5 : R.A Moh Ruslan (1956-1957)
- Bupati Bangkalan ke-6 : R.A.Abd. Karim Brojokusumo (1957-1959)
- Bupati Bangkalan ke-7 : R.P Moh. Nur (1959-1965)
- Bupati Bangkalan ke-8 : Drs. Abd. Mannan (1965-1969)
- Bupati Bangkalan ke-9 : R.P Machmud Surodiputro (1969-1971)

- Bupati Bangkalan ke-10 : Jacky Sudjaki (1971-1982)
- Bupati Bangkalan ke-11 : Drs. Sumarwoto (1982-1988)
- Bupati Bangkalan ke-12 : Drs. Abdul Kadir (1988-1991)
- Bupati Bangkalan ke 13 : Drs. Ernomo (PTHJ) (1991-1993)
- Bupati Bangkalan ke-14 : M. Jakfar Syafei (1993-1998)
- Bupati Bangkalan ke-15 : Ir. H. Moh. Fatah,MM (1998-2003)
- Bupati Bangkalan ke-16 : RKH. Fuad amin imron (2003-2012)
- Bupati Bangkalan ke-17 : R. Muh Makmun Ibnu Fuad (Periode 2013-2018)

2. Visi dan Misi serta Lambang Daerah Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah yang berusaha untuk berkembang dan melangkah maju dalam peradaban dunia maka diperlukan visi dan misi pembangunan sebagai garis besar pembangunan daerah

a. Visi

Terwujudnya Bangkalan Yang Makmur, Mandiri Dan Agamis

Visi tersebut memberikan makna sebagai berikut :

- 1) Bangkalan Makmur yang berarti mewujudkan masyarakat makmur merupakan amanah UUD 1945. Makmur adalah masyarakat yang sejahtera lahir batin, berkeadilan, bermartabat, serta bebas dari belenggu diskriminasi
- 2) Mandiri yaitu kondisi masyarakat usia produktif yang mampu mengakses lapangan kerja (secara sosial ekonomi).

- 3) Agamis yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang menjaga kelestarian nilai-nilai agama.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan Misi Kabupaten Bangkalan yang merupakan penjabaran dari Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan yang Agamis, Produktif, berkualitas dan berdaya saing.
- 2) Mempercepat Peningkatan Perekonomian berbasis potensi lokal.
- 3) Mengembangkan Peran Dunia Usaha dan Investasi.
- 4) Mengelola Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.
- 5) Mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi.
- 6) Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik

c. Lambang Daerah



Gambar 3: Lambang Daerah Kabupaten Bangkalan

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025) 2018

Lambang daerah Kabupaten Bangkalan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1971. Lambang Daerah melukiskan suatu keadaan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah di Pulau Madura yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun arti dari bagian-bagian lambang terdiri dari :

1) Perisai

Bentuk bunga teratai bersudut lima sebagai lambang kesetiaan penuh kepada Pancasila dan sifat kesatriaan, keagungan.

2) Bintang Kuning Emas

Sebagai lambang segala langkah perjuangan masyarakat selalu dipedomani kepercayaan yang mendalam kebesaran Allah SWT

3) Senjata Penggalan dan Senjata Cakra

Sebagai lambang jiwa kepahlawanan dalam menentang penjajah dahulu selalu diwarisi oleh generasi-generasi selanjutnya dalam mempertahankan tegaknya Negara Republik Indonesia.

4) Lautan

Sebagai tanda bahwa kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari Pulau Madura yang dibatasi oleh lautan dan dari tiga arah dan sebagai lambang dari kearifan dan kebijaksanaan yang dalam.

5) Panah, Anak Panah dan Busurnya

Sebagai lambang kemauan yang keras dalam perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur.

6) Api Konang

Sebagai lambang semangat yang tidak kunjung padam dari rakyat Kabupaten Bangkalan,

7) Untaian Bunga Kapas

Untaian bunga kapas sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir melambangkan kemakmuran di bidang sandang dan untaian padi, sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) butir melambangkan kemakmuran di bidang pangan

8) Sesanti Cipta Indra Cakti Dharma

Yang berarti bahwa segala karya dari manusia hanya dapat terwujud dengan baik apabila mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa

3. Kondisi Geografis Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan berada pada bagian sebelah barat Pulau Madura, terletak pada koordinat $112^{\circ}40'06''$ – $113^{\circ}08'04''$ Bujur Timur serta $6^{\circ}51'39''$ – $7^{\circ}11'39''$ Lintang Selatan. Kabupaten Bangkalan memiliki luas wilayah 1.260,14 Km^2 terbagi menjadi 18 kecamatan, 273 desa dan 8 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan terlihat pada Tabel 4.1. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Sampang
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Selat Madura

Tabel 4.1.
Jumlah Kelurahan/Desa, Luas Wilayah Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelurahan/Desa
1	Kamal	4.140	10
2	Labang	3.523	13
3	Kwanyar	4.781	16
4	Modung	7.879	17
5	Blega	9.282	19
6	Konang	8.109	13
7	Galis	12.056	21
8	Tanah Merah	6.856	23
9	Tragah	3.958	18
10	Socah	5.382	11
11	Bangkalan	3.502	13
12	Burneh	6.610	12
13	Arosbaya	4.246	18
14	Geger	12.331	13
15	Kokop	12.575	13
16	Tanjung Bumi	6.749	14
17	Sepulu	7.325	15
18	Klampus	6.710	22
	Jumlah	126.014	281

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025) 2018

Dilihat dari topografi, Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampus, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-10 m di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah yang terletak pada bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 m di atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi terletak di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 diatas permukaan laut.

Tabel 4.2.
Letak, Tinggi Dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Tinggi Dari Permukaan Air Laut	Luas (Ha)
1	Kamal	5	4.140
2	Labang	4	3.523
3	Kwanyar	2	4.781
4	Modung	5	7.879
5	Blega	5	9.282
6	Konang	38	8.109
7	Galis	45	12.056
8	Tanah Merah	47	6.856
9	Tragah	19	3.958
10	Socah	5	5.382
11	Bangkalan	5	3.502
12	Burneh	10	6.610
13	Arosbaya	4	4.246
14	Geger	100	12.331
15	Kokop	80	12.575
16	Tanjung Bumi	2	6.749
17	Sepulu	2	7.325
18	Klampus	2	6.710
	Jumlah	-	126.014

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025) 2018

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan didominasi oleh batuan kapur yang mencapai 80% sedangkan batuan koral hanya memiliki persentase sebesar 15% saja. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi Aluvial Hidromorf, Aluvial Kelabu Kekuningan, Asosiasi Hidromorf, Litosol, Regosol Coklat Kekuningan, Komplek Graund Gorset Kelabu dan lits, Grumosol Kelabu, Kpl. Grumosol Kelabu Litosol, Kpl. Mediteran Coklat dan Litosol, Kpl. Mediteran Merah dan litosol, Kpl. Mediteran Grumosol Regosol Litosol. Gambaran dan luas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
1	Aluvial Hidromurf	10.421	8,27
2	Aluvial Kelabu Kekuningan	3.566	2,83
3	Assosiasi Hidromurf	10.724	8,51
4	Litosol	2.583	2,05
5	Regosol Coklat Kekuningan	2.646	2,10
6	Komplek Graund Gorset Kelabu dan lits	19.973	15,85
7	Grumosol Kelabu	2.583	2,05
8	Kpl Grumosol Kelabu Litosol	2.836	2,25
9	Kpl. Mediteran Coklat dan Litosol	16.155	12,82
10	Kpl. Mediteran Merah Litosol	13.988	11,10
11	Kpl. Mediteran, Grumosol, Regosol, Litosol	40.522	32,18
		126.014	100

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025), 2018

4. Kondisi Penduduk Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan cukup ideal karena tidak padat dan juga tidak lengang dengan jumlah penduduk 956.996 jiwa, jumlah itu sebanding dengan luas daerah di Kabupaten Bangkalan. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 456.072 jiwa atau 48% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 500.924 jiwa atau 52% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan sedangkan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kamal	22.855	24.831	47.687
2	Labang	17.230	19.569	36.799
3	Kwanyar	21.666	24.583	46.249
4	Modung	24.166	25.835	50.001
5	Blega	28.882	31.150	60.032
6	Konang	21.767	23.112	44.880
7	Galis	35.757	38.311	74.068
8	Tanah Merah	29.031	31.807	60.838
9	Tragah	12.555	14.945	27.500
10	Socah	27.263	30.520	57.783
11	Bangkalan	34.892	37.417	72.309
12	Burneh	28.656	30.454	59.111
13	Arosbaya	19.828	22.974	42.802
14	Geger	30.410	34.756	65.166
15	Kokop	31.771	33.051	64.823
16	Tanjung Bumi	23.726	25.536	49.262
17	Sepulu	21.908	22.967	44.875
18	Klampis	23.708	29.105	52.812
Jumlah		456.072	500.924	956.996
Prosentase (%)		48	52	100

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025), 2018

Dari data diatas menunjukkan persebaran penduduk di Kabupaten Bangkalan bisa dikatakan merata meskipun fenomena yang terjadi masih tetap sama seperti masalah klasik di Indonesia yaitu pertumbuhan penduduk selalu ada di Ibu Kota. Kecamatan Bangkalan yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah penduduk terbesar dikarenakan banyaknya perumahan dan pemukiman padat penduduk. Tercatat setidaknya terdapat 9 perumahan yang menyumbang 43% jumlah penduduk di Kecamatan Bangkalan, sedangkan pemukiman padat penduduk tersebar di daerah Sattowan, Temor Pasar dan Kraton.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bangkalan lebih terfokus kepada pertanian dan perkebunan yang mencapai 51%, namun tidak semua daerah bisa dimanfaatkan untuk bertani karena meskipun memiliki curah hujan yang bagus tetapi beresiko gagal panen saat musim kemarau tiba, hal tersebut dipengaruhi oleh suhu yang panas dan juga petani belum mengerti bagaimana caranya memanfaatkan lahannya secara optimal. Jumlah mata pencaharian penduduk akan disajikan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Persentase Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Bangkalan

No.	Mata Pencaharian	%
1.	Pertanian dan Perkebunan	51
2.	Pegawai Negeri Sipil	21
3.	Perdagangan	10
4.	Peternakan dan Perikanan	9
5.	Lain-lain	9
Jumlah		100

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025), 2018

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangkalan memang cukup banyak yang mencapai 21%. Salah satu faktor penyebab masyarakat tertarik dengan PNS dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bangkalan termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang masih jarang. Akibatnya *mindset* masyarakat Kabupaten Bangkalan menganggap PNS adalah satu-satu pekerjaan yang layak bagi mereka karena saat ini data calon PNS baik honorer maupun sukwan mencapai angka 7500 orang (Dinsosnakertrans Kabupaten Bangkalan, 2016)

Kondisi keagamaan di Kabupaten Bangkalan masih memegang teguh kekuatan dan kekentalan agama Islam, hal ini dibuktikan dengan *city branding*

Kabupaten Bangkalan yaitu “Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat” yang baru diresmikan pada tahun 2016. Menurut data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kabupaten Bangkalan, berikut Tabel 4.6

Tabel 4.6
Jumlah Agama yang Dianut di Kabupaten Bangkalan

No.	Agama	Penganut/jiwa
1.	Islam	956.310
2.	Kristen	462
3.	Katolik	203
4.	Kong Hu Chu	21
5.	Hindu	-
6.	Budha	-
7.	Penghayat	-
Jumlah		956.996

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Jumlah Agama di Kab. Bangkalan 2016), 2018

Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangkalan sangat baik, hal ini diperkuat oleh tidak adanya konflik antar umat beragama di Kabupaten Bangkalan. Biasanya sensitivitas keagamaan justru muncul dari agama mayoritas yaitu agama Islam antara penganut organisasi masyarakat (ormas) Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terutama pada saat penentuan awal ramadhan dan hari raya Idul Fitri namun perbedaan tersebut tidak memicu konflik berlebihan.

Tabel 4.7
Ormas Islam di Kabupaten Bangkalan

No.	Ormas Islam	Jumlah
1.	Nahdatul Ulama	945.678
2.	Muhammadiyah	10.597
3.	Lembaga Dakwah Islam	35
Jumlah		956.310

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Profil FKUB Kabupaten Bangkalan 2016), 2018

Banyaknya anggota ormas NU di Kabupaten Bangkalan tidak lepas dari Provinsi Jawa Timur yang merupakan basis massa NU secara nasional sehingga kekentalan ajaran *Ahli Sunnah Waljama'ah* (Aswaja) sangat terasa seperti budaya *tahlilan*, pembacaan sholawat saat maulid Nabi Muhammad SAW dan ritual keagamaan yang dipadukan dengan budaya lokal khas masyarakat Madura. Budaya *nyantri* masih dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan. BPS mencatat hampir 70% masyarakat Bangkalan menamatkan pendidikan informal di pesantren daripada pendidikan formal akibat kondisi tersebut memicu banyaknya pondok pesantren di Bangkalan. Data di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangkalan menyebut bahwa pusat pesantren di Kabupaten Bangkalan terdapat di Kecamatan Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Kwanyar dan Kecamatan Galis. Jadi tidak semua kecamatan memiliki pesantren.

B. Penyajian Data

1. Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*

Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah daerah dengan kultural keagamaan yang sangat kuat bahkan ritual keagamaan menjadi salah satu ciri khas sosial dan budaya masyarakat. Sesuai dengan gambaran umum yang telah dibahas sebelumnya maka peneliti melihat adanya peran dari tokoh agama dalam membangun Kabupaten Bangkalan menjadi lebih baik. Hal ini disampaikan oleh

Bapak Winardi yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan

“Jelas sekali bahwa tokoh agama sangat berperan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan karena kemerdekaan Indonesia dahulu juga dipegaruhi oleh peran tokoh agama itu sendiri

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Bappeda Kab. Bangkalan, 21 Desember 2017), 2018

Selain pendapat diatas, peneliti juga mendapatkan data mengenai peran tokoh agama dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang akan dijabarkan pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Data Kehadiran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada Musrenbang di Kecamatan Bangkalan

No.	Nama	Asal	Jumlah
1.	Demangan	Kades	10
2.	Sattowan	Kades	12
3.	Kraton	Lurah	9
4.	Merlin	Lurah	11
5.	Senenan	Lurah	6
6.	Bancaran	Kades	11
7.	Pejagan	Lurah	12
8.	KH. Makki Nasir	NU	10
9.	KH. Muhammad Subaer	Tokoh Agama	4
10.	KH. Abdulrahman	Tokoh Agama	5
11.	Mukti Paulus	Tokoh Agama	2
12.	Wawan Praja Setya	Tokoh Agama	2
13.	Badi	Blater	6
14.	Yasu	Blater	3
15.	Mat Behri	Blater	6

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Daftar Hadir Musrenbang Kec. Bangkalan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan 2017), 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tokoh agama sangat dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), selain itu tokoh agama juga membawa simpatisan yang mendukungnya sehingga memperkuat saran dan masukan para tokoh agama dalam musrenbang. Data diatas diperkuat oleh

pendapat dari Bapak Eko selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Bangkalan yaitu

“Betul sekali Mas, tokoh agama di Kabupaten Bangkalan sangat memberikan pengaruh dalam pembangunan dan bahkan mereka mengawal secara serius pemerintahan Bupati”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Kaur Kesra Kab Bangkalan, 21 Desember 2017), 2018

Peran tokoh agama dalam pembangunan Kabupaten Bangkalan diperjelas kembali oleh bapak KH. Zainal Abidin selaku Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangkalan

“semua tokoh agama sangat berpengaruh dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan, oleh sebab itu FKUB ada untuk menyatukan semua suara umat beragama dalam membantu pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Ketua FKUB Kab. Bangkalan, 23 Desember 2017), 2018

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan sangat kuat. Pembangunan memiliki beragam jenis sehingga peneliti berusaha memilah letak sentral pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang banyak melibatkan para tokoh agama. Peneliti memilih pengambilan keputusan, pembangunan sosial dan pembangunan infrastruktur karena peneliti merasa ketiga aspek tersebut memiliki peranan yang kuat dari tokoh agama dalam membangun Kabupaten Bangkalan menjadi lebih baik.

a. Peran Tokoh Agama Dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan ujung tombak dari setiap kebijakan yang menghasilkan pembangunan sebab pengambilan keputusan adalah langkah awal dari sebuah proses perbahan yang lebih baik. Hal ini membuat

peneliti yakin bahwa dalam setiap pengambilan keputusan terdapat peran dari tokoh agama sesuai dengan fungsinya.

1) Peran Tokoh Agama Islam dalam Pengambilan Keputusan

Peran tokoh agama islam sangat penting dalam pengambilan keputusan karena agama islam merupakan agama mayoritas di Kabupaten Bangkalan. Hal ini diperjelas oleh pendapat yang diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Kholil yaitu KH. Mukaffi Kholil.

“sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan maka saya selalu terbuka terkait pengambilan keputusan baik secara formal maupun secara non formal, secara formal jika saya memposisikan diri sebagai anggota DPRD seperti dalam acara dengar pendapat atau *hiring*. Jika non formal maka posisi saya sebagai pengasuh Ponpes Darul Kholil maka saya selalu menerima aspirasi dari masyarakat, teman-teman kiai dan bahkan para santri, selama pendapat tersebut masuk akal dan tidak melanggar norma serta hukum”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan anggota DPRD Kab. Bangkalan, 2 Januari 2018), 2018

Peneliti juga mendapatkan data sekunder terkait pengambilan keputusan yaitu pada tabel 4.9 terkait dengan *hiring* yang dilakukan oleh KH. Mukaffi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Tabel 4.9

Daftar Hadir Tamu Undangan Hiring sekaligus Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

No.	Nama	Posisi	Jumlah Anggota
1.	KH. Hasan Busri	Al-Halim	12
2.	KH. Safaat	Darul Mukmin	10
3.	Ma'o'	Dusun Demangan	9
4.	Maksum	Dusun Demangan	14
5.	KH. Abu Naim	Darul Hikam	13
6.	H. Syaiful Rizal Fakhil	Darul Anbiya	14
7.	KH. Fakhruddin Kholil	Assalafiyah Alkholiliyah	17
8.	KH. Farouq Alkomi	An Nur Fuadi	12

No.	Nama	Posisi	Jumlah Anggota
9.	KH. Mukhlis Alkomi	Darul Mustofa	16
10.	H. Mosleh	Dusun Kauman	9
11.	Co'emang	Dusun Kauman Timur	5
12.	H. Nasir	Takmir Masjid Tunjung	5
13.	Lk. Ni	Dusun Bunalas	11
14.	Mustofa	Dusun Bunalas	4
15.	Kopek	Dusun Pageddangan	10
16.	H. Moderi	Dusun Embhugen	3

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (*Hiring* KH, Mukaffi 2017), 2018

Data diatas menunjukkan bahwa *hiring* atau dengar pendapat merupakan acara pemerintah yang dikolaborasikan dengan acara keagamaan. Selain itu tokoh agama dan tokoh masyarakat (*blater*) juga dilibatkan dalam proses *hiring*. Data diatas juga menunjukkan bahwa kiai membawa anggota jauh lebih banyak daripada tokoh masyarakat sehingga memperkuat hipotesa peneliti bahwa tokoh agama khususnya kiai berperan sebagai pemimpin informal yang dapat memberikan pengaruh dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.



Gambar 4. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Hiring di Kediaman Bapak H. Mochammad Romli Tahun 2017

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti 2017), 2018

Dari wawancara dan data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kiai memiliki pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Bangkalan. Contoh kasus saat ini adalah perubahan *city branding* Kabupaten Bangkalan yang semula “Bangkalan Kota Salak” menjadi “Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat” sejak bulan Maret 2017 yang dijelaskan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Daftar Ulama pada Deklarasi Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat

No.	Nama	Asal	Anggota
1.	KH. Zainal Abidin	Burneh	60
2.	KH. Makki Nasir	Bangkalan	80
3.	KH. Ja'Far Al Habari	Kamal	40
4.	KH. Ahmad Jauhari Aris	Burneh	40
5.	KH. Nurruddin Arrahman	Burneh	60
6.	KH. Abu Naim	Burneh	50
7.	KH. Mukhlis Alkomi	Burneh	50
8.	KH. Mukaffi Kholil	Burneh	50
9.	KH. Matwar	Arosbaya	35
10.	KH. Muhammad Subaer	Bangkalan	100
11.	KH. Abdulrahman	Bangkalan	60
12.	KH. Mahfud	Galis	45
13.	KH. Farouq Alkomi	Burneh	30
14.	KH. Khalid	Modung	35
15.	KH. Safaat	Burneh	30
16.	KH. Sulaiman Anwari	Modung	40
17.	KH. Firdausi	Modung	25
18.	KH. Syaiful	Tanjung Bumi	20
19.	KH. Helih	Blega	35
20.	KH. Syaid Hasyim	Blega	40

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dok. Kesra Kab. Bangkalan 2017), 2018

Data diatas menunjukkan kiai yang terdata dalam pelaksanaan deklarasi perubahan identitas Kabupaten Bangkalan, jumlah tersebut belum ditambah kehadiran LSM, simpatisan dan tokoh masyarakat (*blater*) serta perangkat

daerah terkait. Hal ini diperjelas oleh Bapak Eko selaku Ketua Urusan Kesra Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

“sebenarnya perubahan *city branding* merupakan tuntutan para kiai karena para kiai merasa nama Bangkalan tercoreng akibat Ra Fuad terciduk oleh KPK dan Bupati menyetujui usulan tersebut”

Sumber: Data Primer Hasil Observasi (Wawancara Peneliti dengan Kaur Kesra Kab. Bangkalan, 21 Desember 2017), 2018



Gambar 5. Gapura Bangkalan “Kota Dzikir dan Sholawat” Tahun 2017

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti), 2018

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ketua FKUB Kabupaten Bangkalan KH.

Zainal Abidin yang menerangkan sebagai berikut:

“waktu itu ormas islam datang ke Kesra menyampaikan keluhan kesah terkait *city branding* tersebut dan pada malam harinya para kiai diundang di kediaman ketua DPRD untuk membicarakan perubahan nama tersebut”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Ketua FKUB Kab. Bangkalan, 23 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara dan data yang diperoleh menunjukkan adanya peran kiai untuk mengubah *city branding* Kabupaten Bangkalan menjadi “Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat”. Hal ini menjadi bukti bahwa tokoh agama islam

atau kiai sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.

2) Peran Tokoh Agama Kong Hu Chu dalam Pengambilan Keputusan

Peran tokoh agama Kong Hu Chu dalam pengambilan keputusan tidak terlalu besar dikarenakan agama Kong Hu Chu sebagai agama minoritas dan juga tidak memiliki perwakilan di tingkat legislatif. Contoh kasusnya yaitu perubahan *city branding* Kabupaten Bangkalan dimana peran tokoh agama Kong Hu Chu tidak terlalu besar. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yuyun selaku sekretaris Klenteng Eng An Bio sebagai berikut:

“kami sama sekali tidak dilibatkan dalam perubahan nama tersebut dan pemerintah melalui Bakesbangpol hanya memberi surat edaran saat perubahan nama sudah terjadi. Sebenarnya kami tidak mempersalahkan nama tersebut karena kami tahu bahwa kami hanya minoritas tetapi alangkah eloknya jika bapak Bupati mau mengajak kami duduk bersama agar kami tahu Kabupaten Bangkalan ini mau dibawa kemana”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Klenteng Eng An Bio, 26 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tokoh agama Kong Hu Chu hanya diberikan informasi terkait perubahan *city branding* tersebut sehingga informan yang mewakili agama Kong Hu Chu di Kabupaten Bangkalan merasa kurang puas karena kurang dilibatkan namun secara umum tokoh agama Kong Hu Chu menerima perubahan *city branding* tersebut.

3) Peran Tokoh Agama Katolik dalam Pengambilan Keputusan

Peran tokoh agama Katolik dalam pengambilan keputusan tidak terlalu besar dikarenakan agama Katolik sebagai agama minoritas dan juga tidak memiliki perwakilan di tingkat legislatif. Contoh kasusnya yaitu perubahan *city branding* Kabupaten Bangkalan dimana peran tokoh agama Katolik tidak

terlalu besar. Hal ini disampaikan oleh pimpinan Gereja Katolik Santa Maria Fatima yaitu Romo Eli sebagai berikut:

“Kami sempat mendengar kabar dari Pak Kiai Zainal tentang rencana perubahan nama tersebut tetapi kami tidak diundang dalam pembahasan tersebut. Sebenarnya umat katolik tidak mempermasalahkan tetapi tolonglah kami jangan dianak tirikan oleh Bapak Bupati”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Gereja Katolik Santa Maria, 24 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tokoh agama Katolik hanya diberikan informasi mengenai rencana perubahan *city branding* tersebut namun informan tidak diundang dalam perumusan ataupun deklarasi perubahan tersebut namun informan tetap menerima keputusan perubahan *city branding* Kabupaten Bangkalan dan tetap mengharapkan perubahan tersebut membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat.

4) Peran Tokoh Agama Kristen dalam Pengambilan Keputusan

Peran tokoh agama Kristen dalam pengambilan keputusan tidak terlalu besar dikarenakan tidak memiliki perwakilan di tingkat legislatif. Contoh kasusnya yaitu perubahan *city branding* Kabupaten Bangkalan dimana peran tokoh agama Kristen tidak terlalu besar. Hal ini disampaikan oleh Pemimpin Gereja Pantekosta Bangkalan Pendeta Zefanja Walujo sebagai berikut:

“kami tidak memiliki hubungan dengan FKUB karena kami sejak awal tidak pernah diberitahu apapun dalam pengambilan keputusan apalagi soal perubahan *city branding*. Jujur saja ya pemerintah sama sekali tidak pernah memberikan informasi apalagi bantuan dana kepada gereja kami”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Gereja Pantekosta, 25 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tokoh agama Kristen tidak diberikan informasi baik dari segi perencanaan, proses maupun hasil dari

perubahan *city branding* tersebut sehingga menimbulkan ketidak puasan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Selain itu tokoh agama Kristen juga menyebut bahwa pemerintah kabupaten Bangkalan tidak melibatkan pihak gereja Kristen dalam setiap pengambilan keputusan.

Dari penyajian hasil wawancara diatas dapat diketahui tokoh agama khususnya tokoh agama Islam sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Bangkalan termasuk dalam keputusan *city branding* yaitu “Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat”, tetapi tokoh agama non-islam kurang dilibatkan dan hanya diberikan informasi terkait hal tersebut.

b. Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara untuk menuju modernitas pembangunan. Jika dikaitkan dengan peran tokoh agama dalam pembangunan infrastruktur maka pembangunan lebih kepada sarana dan prasarana keagamaan. Hal ini diutarakan langsung oleh Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan yaitu Ibu Mahmudah sebagai berikut:

“Biasanya permohonan bantuan dana pembangunan berkaitan dengan jalan kearah masjid atau jalan dilingkungan pondok untuk diperbaiki atau yang berkaitan dengan aksesibilitas ponpes dan masjid”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Ka. TU Dinas PUPR Kab. Bangkalan, 26 Desember 2017), 2018

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan yaitu Ibu Diana sebagai berikut:

“Untuk fasilitas keagamaan umumnya masjid dan pondok pesantren namun untuk gereja dan klenteng itu jarang sekali ya”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Ka. TU Dinas PRKP Kab. Bangkalan, 26 Desember 2017), 2018

Ibu Diana juga memperkuat pendapatnya dengan memberikan tabel tentang permohonan bantuan pendanaan di Bulan November 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Permohonan Bantuan Pendanaan Bulan November 2017

No.	Nama	Lokasi
1.	Mat Rai/KH. Jauhari	Burneh
2.	Hoilil/KH. Mukhlis	Burneh
3.	Fausen/KH. Helih	Blega
4.	Hendri Prasetyo	Bangkalan

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Daftar Permohonan Bantuan Pendanaan Keagamaan Dinas PRKP Kab. Bangkalan 2017), 2018

Pendapat Ibu Diana dan data diatas menunjukkan bahwa tokoh agama sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur terutama dalam pembangunan infrastruktur keagamaan. Data diatas juga menunjukkan bahwa tokoh agama Islam lebih aktif dalam mengupayakan pembangunan infrastruktur keagamaannya.

1) Peran Tokoh Agama Islam dalam Pembangunan Infrstruktur

Agama Islam merupakan agama mayoritas di Kabupaten Bangkalan sehingga tokoh agama islam sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur terutama dalam bidang keagamaan yang meliputi masjid, pondok pesantren dan juga madrasah *ibtida'iyah* (MI). Hal ini diperkuat oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa yaitu KH. Mukhlis Alkomi yaitu

“pembangunan ini (sambil menunjuk pondoknya) merupakan bantuan dari pemerintah, *alhamdulillah*. Saya juga sering ke Dinas PU untuk mengecek berkas pengajuan bantuan dana”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (wawancara dengan Pengasuh Ponpes Darul Mustofa, 2 Januari 2018), 2018



Gambar 6: Renovasi Pondok Pesantren Darul Mustofa Tahun 2017

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti 2017), 2018

Hasil wawancara dan observasi penelitian menjelaskan bahwa tokoh agama islam selalu aktif dalam pembangunan infrastruktur dan juga mengawal serta mengawasi proses pembangunan infrastruktur dengan *output* pembangunan pondok pesantren yang didanai oleh anggaran pembangunan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan.

2) Peran Tokoh Agama Kong Hu Chu dalam Pembangunan Infrastruktur

Peran tokoh agama Kong Hu Chu dalam pembangunan infrastruktur khususnya dalam bidang keagamaan belum maksimal. Hal ini diungkapkan Ibu Yuyun selaku sekretaris Klenteng Eng An Bio sebagai berikut:

“Kami tidak pernah Mas meminta dana kepada pemerintah, mungkin pemerintah sudah menganggarkan tetapi kami masih merasa mampu membiayai diri kami sendiri, selain itu birokrasi juga lamban Mas, minta dana sekarang bisa tahun depan baru cair”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (wawancara dengan Sekretaris Klenteng Eng An Bio, 26 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara dengan tokoh agama Kong Hu Chu menjelaskan bahwa pihak agama Kong Hu Chu tidak meminta bantuan pendanaan karena pihak

Klenteng merasa mampu selain itu birokrasi pemerintah Kabupaten Bangkalan dianggap lamban dan kurang responsif. Hal inilah yang membuat efek traumatik dan bisa menghambat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan.

3) Peran Tokoh Agama Katolik dalam Pembangunan Infrastruktur

Peran tokoh agama Katolik dalam pembangunan infrastruktur belum maksimal. Pendapat diberikan oleh pimpinan Gereja Katolik Santa Maria Fatima yaitu Romo Eli sebagai berikut:

“Kami tidak pernah meminta dana kepada pemerintah tetapi biasanya kami diminta oleh Bakesbangpol untuk mengambil dana sekian juta. Ya dana dari pemerintah biasanya untuk dibuat bakti sosial di hari paskah itu pun tidak banyak. Kami memiliki jemaat yang menjadi pejabat disana sehingga mudah untuk mendapatkan jatah dana kami, tetapi jujur saja kami malas jika disuuh meminta dana kepada pemerintah karena prosesnya lama, lebih baik kami urunan antar jemaat jika kami ada kegiatan”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Gereja Katolik Santa Maria Fatima, 24 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara dengan tokoh agama Katolik menjelaskan bahwa pihak Gereja Santa Maria Fatima telah mendapatkan bagain dana untuk melaksanakan bakti sosial keagamaan. Selain itu tokoh agama Katolik juga tidak pernah mengajukan permohonan pendanaan dan lebih memilih menggunakan sumbangan dari jemaat Gereja untuk melakukan kegiatan keagamaan.

4) Peran Tokoh Agama Kristen dalam Pembangunan Infrastruktur

Peran tokoh agama Kristen dalam pembangunan infrastruktur lebih kepada pembangunan secara mandiri dan tanpa bantuan dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Pemimpin Gereja Pantekosta Bangkalan Pendeta Zefanja Walujo sebagai berikut:

“pemerintah tidak pernah sepeserpun memberikan bantuan dana kepada gereja ini. Mungkin di Katolik mereka ada orang dalam agar dana tetap cair tetapi kami tidak memiliki orang didalam birokrasi. Semua renovasi gereja adalah swadaya dari jemaat. Oh ya satu-satunya bantuan dari pemerintah itu saat perayaan Natal berupa pengamanan dan itupun kami memberikan uang tip”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Gereja Pantekosta, 25 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemkab Bangkalan belum optimal dalam pembangunan infrastruktur agama Kristen sehingga membuat pembangunan infrastruktur untuk agama Kristen dilakukan swadaya oleh para jemaatnya..

Hasil wawancara dengan para tokoh agama menyebutkan bahwa tokoh agama sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur keagamaan di Kabupaten Bangkalan. Selain itu kiai sangat berperan dibandingkan tokoh agama lain dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur keagamaan. Pemerintah juga kurang responsif dalam menanggapi masalah pengajuan pendanaan untuk agama non islam.

c. Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial merupakan perubahan yang berkesinambungan untuk perubahan yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan tokoh agama maka pembangunan sosial merupakan sebuah wadah untuk memajukan umat. Hal ini diungkapkan Bapak Kholid Ibrahim selaku Koordinator Kejuruan Mesin Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan:

“Dinsos selalu bekerja sama dengan tokoh agama baik Pak Kyai, Pendeta, Romo dan pihak Klenteng melalui program BLK guna memajukan kesejahteraan masyarakat Bangkalan. BLK sekarang sudah masuk ponpes karena penyampaian informasi oleh Kyai lebih diperhatikan oleh masyarakat daripada media yang telah kami siapkan”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Koordinator Kejuruan Mesin BLK Dinsosnakertrans, 29 Desember 2017), 2018



Gambar 7: Kegiatan Otomotif di BLK Dinsosnakertrans Tahun 2017

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti 2017) 2018

Pendapat Bapak Kholid tersebut diperkuat oleh data kerjasama antara

BLK dengan Pondok Pesantren sebagai berikut:

Tabel 4.12

Daftar Kerjasama BLK dengan Pondok Pesantren

No.	Pondok Pesantren	Bidang
1.	Darul Hikmah	Otomotif, Komputer
2.	Darul Mustofa	Komputer
3.	Al Hikam	Otomotif
4.	Manbaul Hikam	Otomotif, Menjahit
5.	An Nur Fuadi	Komputer
6.	Darul Hijroh	Komputer

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Kerjasama UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Bangkalan 2017) 2018

Data tersebut menunjukkan pondok pesantren sebagai salah satu sarana mengembangkan pembangunan sosial khususnya dibidang ketenagakerjaan sehingga diharapkan kerjasama tersebut mempermudah pengembangan SDM di Kabupaten Bangkalan. Kerjasama tersebut tidak lepas dari peran kiai yang mampu menjadi magnet bagi masyarakat untuk mengikuti program BLK.

1) Peran Tokoh Agama Islam dalam Pembangunan Sosial

Kiai memiliki magnet bagi masyarakat Bangkalan sehingga bekerja sama dengan pondok pesantren merupakan sebuah langkah jitu dalam peningkatan SDM. Hal ini diutarakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam KH. Nuruddin Arrahman sebagai berikut:

“Dinsos dan Al Hikam selalu bekerjasama untuk menyukseskan program BLK sehingga bagi para santri dan juga orang tua santri untuk mengikuti BLK bisa di Al Hikam”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, 30 Desember 2017), 2018

Hal senada diungkapkan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah yang juga bekerja sama dengan BLK yaitu Bapak KH. Jauhari Aris yaitu

“di Darul Hikmah lengkap programnya sama seperti di BLK karena kami bermitra dengan mereka sehingga para santri dan warga sekitar disiapkan untuk menghadapi peluang mencari kerja”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, 23 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara dengan tokoh agama Islam yaitu adanya kerjasama dengan BLK untuk mengembangkan para santri guna mempersiapkan kemampuan setelah lulus dari pondok pesantren. Kegiatan BLK yang bekerja sama dengan pondok pesantren sangat diapresiasi oleh para tokoh agama islam untuk menciptakan Kabupaten Bangkalan yang sejahtera.

2) Peran Tokoh Agama Kong Hu Chu dalam Pembangunan Sosial

Peran tokoh agama Kong Hu Chu dalam pembangunan sosial memang tidak terlalu besar karena jumlah jemaat yang sedikit. Hal ini diungkapkan oleh ibu Yuyun selaku sekretaris Klenteng Eng An Bio sebagai berikut:

“Biasanya Dinsos datang untuk menawarkan program BLK kepada kami dan biasanya kami berpartisipasi meskipun tidak selalu maklum mas, jemaat kami hanya sedikit tapi kami mengapresiasi pihak Dinsos tersebut karena kami merasa diperhatikan”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Sekretaris Klenteng Eng An Bio, 26 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara dengan tokoh agama Kong Hu Chu yaitu adanya penawaran kerjasama dengan BLK namun perwakilan agama Kong Hu Chu hanya datang pada sebagian acara dikarenakan jumlah jemaat yang tidak banyak. Tokoh agama Kong Hu Chu mengapresiasi hal tersebut karena mencerminkan rasa keadilan terhadap minoritas.

3) Peran Tokoh Agama Katolik dalam Pembangunan Sosial

Peran tokoh agama katolik dalam pembangunan sosial sangat maksimal Hal tersebut diungkapkan oleh pimpinan Gereja Katolik Santa Maria Fatima yaitu Romo Eli sebagai berikut:

“BLK itu menjadi tempat bagi jemaat kami untuk bersatu dengan agama lain dan kami selalu mengirimkan perwakilan sesuai dengan minatnya”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pimpinan Gereja Katolik Santa Maria Fatima, 24 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara dengan tokoh agama Katolik menjelaskan bahwa BLK merupakan sarana untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan umat agama lain. Selain itu, pihak agama Katolik juga mengapresiasi kebijakan Dinsos tersebut dengan mengirimkan jemaat yang berminat untuk masuk BLK sesuai dengan minatnya.

4) Peran Tokoh Agama Kristen dalam Pembangunan Sosial

Peran tokoh agama Kristen dalam pembangunan sosial ditandai dengan mengajak dan juga memberi kesempatan pada jemaat gereja saat melakukan

kegiatan ibadah misa. Pendapat ini diberikan oleh Pemimpin Gereja Pantekosta Bangkalan Pendeta Zefanja Walujo sebagai berikut:

“Dinsos ya Mas, mereka datang biasanya untuk mengajak kami dan menawarkan program BLK, ya ketika misa saya tawarkan kepada jemaat dan saya data siapa yang berminat untuk bergabung. Mungkin hanya Dinsos dan Bakesbangpol yang setidaknya berkomunikasi dengan kami”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pemimpin Gereja Pantekosta, 25 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tokoh agama Kristen memiliki peran dalam pembangunan sosial yaitu dengan menyampaikan bahwa BLK telah membuka pelatihan sehingga bagi jemaat yang berminat dipersilahkan untuk mengikutinya. Selain itu, tokoh agama Kristen juga mengapresiasi kegiatan BLK yang dilakukan oleh Dinsos karena agama Kristen merasa diperhatikan oleh Pemkab Bangkalan.

Dari hasil wawancara dengan para tokoh agama maka dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama dalam pembangunan sosial khususnya di bidang ketenaga kerjaan sangat besar meskipun dalam praktiknya berbeda. Hal ini terjadi karena Pondok Pesantren merupakan sebuah sekolah atau lembaga pendidikan sehingga bisa bermitra dengan Dinsos tetapi untuk gereja dan klenteng bukan lembaga pendidikan akibatnya Dinsos hanya mengajak tanpa bermitra dengan agama non-Islam.

2. Hubungan Antar Aktor Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Good Governance

Hubungan antar aktor dalam pembangunan merupakan instrumen penting karena jika hubungan antar aktor tidak harmonis maka dapat menimbulkan

kesalah pahaman dalam pelaksanaan pembangunan. *Good governance* terdapat tiga aktor utama yaitu pemerintah (state), swasta (*privat*) dan masyarakat (*civil society*).

a. Kondisi Aktor Pembangunan di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*

Peneliti mencoba menggambarkan kondisi para aktor di Kabupaten Bangkalan. Menurut Bapak Winardi yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan

“hubungan pemerintah dengan masyarakat dan juga investor itu sangat harmonis sekali meskipun jumlah investor disini tidak banyak dan cenderung dimiliki oleh masyarakat Bangkalan sendiri”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bangkalan, 21 Desember 2017), 2018

Peneliti juga mendapatkan dokumen yang memperkuat pendapat dari Bapak Eko mengenai minimnya investor asing di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 4.13
Investor non Lokal Di Kabupaten Bangkalan Pada Tahun 2016

No.	Nama	Jenis dan Status
1.	PT. Telekomunikasi Indonesia	Akses Komunikasi dan Informasi
2.	PT. Lamicitra Nusantara	Pengembangan Pelabuhan Socah (masih menunggu Konsensus Menhub)
3.	PT. Madura Industrial Seaport City	Pembangunan sentra industri di kawasan pelabuhan Socah (masih belum jelas statusnya)
4.	PT. Semen Indonesia	Pergudangan
5.	PT. Aqua Golden Mississippi Indonesia	Pergudangan

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Investasi Kabupaten Bangkalan Tahun 2016), 2018

Menurut Bapak Eko selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Bangkalan

“kami selalu menjadi wadah dalam memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, masyarakat dan investor meskipun jumlah investor sedikit dan bersifat lokal. Umumnya masyarakat diwakili oleh LSM, *Blateran* dan juga para tokoh agama tergantung situasi topik bahasannya”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Kaur Kesra Kabupaten Bangkalan, 21 Desember 2017), 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa hanya ada lima investor asing di Kabupaten Bangkalan dan hanya PT Telekomunikasi Indonesia yang benar-benar menanamkan investasinya. Data diatas juga menunjukkan beberapa investor yang masih belum jelas status bagaimana kelanjutan dari investasinya di Kabupaten Bangkalan. Peneliti menyimpulkan bahwa sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor *privat* yang menggerakkan perekonomian di Kabupaten Bangkalan.

b. Hubungan antar Tokoh Agama dengan Pemerintah dan *Privat*

Adanya tokoh agama yang menjadi salah satu kekuatan informal di Kabupaten Bangkalan membutanya memiliki kedudukan tersendiri sehingga peneliti ingin melihat hubungan tokoh agama dengan pemerintah dan juga dengan sektor *privat*

1) Hubungan Tokoh Agama Islam dengan Tokoh Agama Lain, Pemerintah dan *Privat*

Tokoh agama Islam yang mewakili kultur budaya serta agama mayoritas di Kabupaten Bangkalan tentu diharapkan memiliki hubungan baik dengan tokoh agama lain, pemerintah dan juga sektor *privat*. Hal ini diungkapkan oleh KH. Jauhari Aris selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah yaitu

“hubungan kami dengan tokoh agama non-islam juga pemerintah itu ya baik-baik saja meskipun seringkali pemerintah tidak mau bertanggung jawab dengan kebijakannya. Untuk hubungan dengan investor ya, investor itu semacam pihak luar kan ya, saya rasa Darul Hikmah belum pernah dilibatkan”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, 30 Desember 2017), 2018

Hal yang sama diungkapkan oleh KH. Mukhlis Alkomi selaku Pengasuh

Pondok Pesantren Darul Mustofa menyatakan sebagai berikut:

“hubungan para kiai lebih dekat kepada bapak dewan karena didalam bapak dewan terdapat banyak kiai atau pengurus NU. Untuk pihak swasta kami belum pernah dilibatkan dan tokoh agama lain kami sangat terbuka”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa, 2 Januari 2018), 2018

Hasil wawancara dengan para tokoh agama Islam menunjukkan bahwa hubungan dengan tokoh agama lain sangat toleran dan saling menghargai. Untuk hubungan dengan pemerintah memang baik dan saling berkoordinasi, sedangkan untuk hubungan dengan sektor privat masih belum ada dikarenakan minimnya sektor privat di Kabupaten Bangkalan.

2) Hubungan Tokoh Agama Kong Hu Chu dengan Tokoh Agama Lain, Pemerintah dan Privat

Tokoh agama Kong Hu Chu dengan tokoh agama lain, pemerintah dan juga privat tergolong baik. Hal ini disampaikan oleh ibu Yuyun selaku sekretaris Klenteng Eng An Bio sebagai berikut:

“Hubungan kami dengan pemerintah ya baik-baik saja Mas hanya saja mereka tidak terbuka kepada kami terkait pembangunan. Untuk tokoh agama Islam mereka sangat baik kepada kami. Untuk masalah investor ya kami belum pernah menemukan adanya koordinasi dengan mereka”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Sekretaris Klenteng Eng An Bio, 26 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa tokoh agama Kong Hu Chu memiliki hubungan yang baik dengan tokoh agama Islam dan juga dengan pemerintah meskipun terkadang Pemkab Bangkalan tidak terbuka dalam pembangunan. Untuk hubungan dengan privat, tokoh agama Kong Hu Chu tidak paham dikarenakan minimnya sektor privat di Kabupaten Bangkalan.

3) Hubungan Tokoh Agama Katolik dengan Tokoh Agama Lain, Pemerintah dan Privat

Hubungan tokoh agama Katolik sebagai aktor pembangunan dengan tokoh agama lain serta pemerintah sangat baik. Pendapat ini disampaikan oleh pimpinan Gereja Katolik Santa Maria Fatima yaitu Romo Eli sebagai berikut:

“karena kami memiliki jemaat didalam birokrasi jadi kami merasa hubungan dengan pihak pemerintah baik-baik saja. Kami pernah berhubungan dengan investor tapi di Surabaya. Bangkalan nih sulit ada investor yang mau Mas, untuk hubungan dengan agama lain semuanya baik, *kok*”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pemimpin Gereja Katolik Santa Maria Fatima, 24 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara dengan tokoh agama Katolik menjelaskan bahwa hubungan dengan pemerintah dan tokoh agama lain semua baik-baik saja, namun untuk hubungan investor masih belum terlihat karena minimnya investor asing di Kabupaten Bangkalan.

4) Hubungan Tokoh Agama Kristen dengan Tokoh Agama Lain, Pemerintah dan Privat

Hubungan tokoh agama Kristen dengan tokoh agama lain dan pemerintah serta sektor privat bisa dikatakan baik. Hal ini diungkapkan oleh Pemimpin Gereja Pantekosta Bangkalan Pendeta Zefanja Walujo sebagai berikut:

“kami merasa hubungan gereja kristen dengan pmerintah baik-baik saja ya meskipun kami merasa dianak tirikan.sedangkkn hubungan dengan investor ya belum ada mas, Bangkalan itu kering pembangunan”

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pemeimpin Gereja Pantekosta, 25 Desember 2017), 2018

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa hubungan tokoh agama Kristen dengan tokoh agama lain dan berlangsung sangat hangat tetapi tokoh agama Kristen menilai bahwa kurangnya sektor privat dalam pembangunan.

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*

Untuk meningkatkan medernitas perkotaan maka diperlukan sebuah proses yang disebut dengan pembangunan. Salah satu implikasi utama pembangunan menurut Bryan dan White (dalam Suryono, 2010:2) adalah pembangunan mendorong kebersamaan dan pemerataan nilai. Teori tersebut bisa dikatakan relevan dengan kondisi di Kabupaten Bangkalan sebab tokoh agama diberikan ruang yang sangat luas untuk berpartisipasi didalam pembangunan sehingga persamaan dan pemerataan nilai-nilai sosial terlaksana dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangkalan yang menjadi wadah persatuan dan kebersamaan semua umat beragama yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama tesebut.

Salah satu unsur penting pembangunan menurut Suryono (2010:4) adalah potensi masyarakat yang ada didalam masyarakat itu sendiri untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Teori ini relevan dengan kondisi di Kabupaten

Bangkalan bahwa pihak internal masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama diberikan kesempatan untuk bergabung didalam menyukkseskan keberhasilan pembangunan. Faktor keberhasilan pembangunan Menurut Colfer dan Capistrano (2005) adalah faktor kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keberanian, intuisi, dan intimidasi terhadap situasi dan peluang yang ada untuk memimpin sebuah tim, organisasi dan negara. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009 membagi pemimpin menjadi dua yaitu pemimpin formal dan informal. Di Kabupaten Bangkalan, pemimpin formal adalah pihak pemerintah sendiri, sedangkan tokoh agama merupakan pemimpin informal yang dapat berkontribusi dalam menyukkseskan pembangunan daerah.

Penerapan desentralisasi yang menghasilkan model-model pembangunan daerah yang spesifik sesuai dengan pendapat Tjokrowinoto dalam Suryono (2010:46) yaitu *cultural development* yang menghasilkan sebuah keunikan atau ciri khas didalam pembangunan daerah yang berdasarkan sosial budaya dan kultural daerah tersebut. Proses *cultural development* inilah yang mendasari peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan yang lebih dikerucutkan kembali menjadi peran tokoh agama dalam pengambilan keputusan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial.

a. Peran Tokoh Agama Dalam Pengambilan Keputusan

Sebagai salah satu daerah di Pulau Madura yang memegang teguh budayanya yaitu "*buppa' bhabbhu ghuru rato*" yang merupakan alur tingkatan kepatuhan yatu kepada bapak dan ibu (orang tua) kemudian kepada guru dan yang terakhir kepada penguasa (pemerintah). Adanya kiai besar Syaikh Khona

Mochammad Kholil di Kabupaten Bangkalan membuat kekuatan agama islam menjadi dominan hingga menyebar ke dunia pendidikan akibatnya banyaknya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bangkalan. Oleh sebab itu kepatuhan kepada guru dapat disinonimkan dengan kepatuhan kepada kiai.

Peran tokoh agama dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Bangkalan adalah penggunaan posisi atau kedudukan seseorang didalam masyarakat untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu, hal ini sesuai dengan pendapat Levinson dalam Soekanto (2013:21) mengenai cakupan dari sebuah peran. Cakupan ini juga meliputi kontribusi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama yang berkedudukan sebagai pemimpin informal didalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Peran menurut Soekanto (2014:242) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif. Peran tokoh agama dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Bangkalan lebih bersifat aktif dan pasif. Bersifat aktif untuk tokoh agama islam (kiai) yaitu mampu memberikan sebuah pendapat, kritik dan saran secara nyata.

Contoh kasusnya yaitu perubahan *city branding* Kabupaten Bangkalan yang semula adalah “Bangkalan Kota Salak” menjadi “Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat”. Perubahan identitas tersebut diawali dengan desakan para kiai kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sehingga dengan proses yang cepat dan singkat maka Bupati Bangkalan memutuskan mengubah identitas Kabupaten Bangkalan menjadi “Kota Dzikir dan Sholawat” pada tanggal 3 Maret 2017. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki citra Kabupaten

Bangkalan pasca terciduknya mantan Bupati Bangkalan yaitu RKH. Fuad Amin Imron. Selain itu patut dipertanyakan bagaimana langkah konkrit dalam memaksimalkan perubahan nama tersebut agar dapat efektif dan efisien sesuai dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan.

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance* maka perubahan identitas Kabupaten Bangkalan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat non-islam sehingga tokoh agama non-islam merasa dicurangi. Selain itu keputusan tersebut tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat non-islam yang diwakili oleh para tokoh agama sehingga peran FKUB yang diharapkan mampu menyerap aspirasi dan partisipasi semua umat beragama menjadi sia-sia. Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan juga tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan tersebut sehingga tokoh agama non-islam hanya tahu bahwa Kabupaten Bangkalan telah berubah identitasnya.

Peneliti melihat adanya prinsip berwawasan kedepan (*strategy vision*) dengan strategi masa depan yang positif yaitu dengan perubahan identitas tersebut semakin mempertegas bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan daerah islam. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bangkalan memberikan ruang bagi masyarakat non-islam untuk berkembang dan bersosialisasi tanpa harus khawatir dengan identitas daerah yang baru.

b. Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Infrastruktur

Dalam pembangunan infrastruktur peran tokoh agama sangat kuat dan lebih aktif dilakukan oleh tokoh agama islam yaitu kiai. Dalam pembangunan infrastruktur kiai selalu aktif mengajukan permohonan dana baik untuk masjid

maupun pondok pesantren. Tokoh agama non-islam kurang diperhatikan namun untuk tokoh agama Katolik memiliki akses “orang dalam” didalam birokrasi pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini membuat tokoh agama Katolik memiliki jaringan guna menyukseskan kegiatan keagamaan mereka. Berbanding terbalik dengan kondisi tokoh agama Kristen dan Kong Hu Chu yang menyebut segala proses kegiatan pembangunan tempat ibadah merupakan hasil dari swadaya dari jemaat.

Peran dibagi menjadi tiga jenis menurut Soekanto (2014:242) yaitu peran aktif, pasif dan partisipatif. Peran kiai dalam pembangunan infrastruktur bersifat aktif karena kiai selalu aktif dalam mengajukan permohonan pendanaan untuk mengembangkan pembangunan tempat ibadah maupun pondok pesantren. Tokoh agama Katolik lebih kepada peran partisipatif karena proses pendanaan untuk pembangunan infrastruktur telah disediakan oleh pemerintah meskipun sedikit mengandung unsur nepotisme. Jenis peran untuk agama Kristen dan Kong Hu Chu adalah peran pasif karena tokoh agamanya tidak melakukan permohonan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur keagamaan. Kesimpulannya adalah tokoh agama islam memiliki koridor khusus dalam mengajukan permohonan pendanaan pembangunan infrastruktur keagamaan bahkan cenderung mendominasi kewenangan pemimpin formal.

Kekuatan kiai sebagai tokoh informal yang bahkan lebih kuat daripada tokoh masyarakat (*blater*) membuat pemerintah Kabupaten Bangkalan harus merangkul kiai dalam setiap langkah pembangunannya. Terdapat dua faktor yang menjadi analisis peneliti yaitu faktor pertama adalah kedekatan kiai

dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Hal ini bisa saja terjadi karena terdapat anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang berlatar belakang pondok pesantren selain itu Bupati Bangkalan juga keturunan ulama besar Madura yaitu Syaikh Khona Mochammad Kholil. Faktor yang kedua adalah pemerintah memang sulit untuk mengusik kekuatan pemimpin informal karena pemimpin informal lebih didukung oleh masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten Bangkalan.

c. Peran Tokoh Agama Dalam Pembangunan Sosial

Peran tokoh agama dalam pembangunan sosial sangat kuat karena masing-masing tokoh agama memiliki ikatan kerjasama dengan pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dalam hal meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pemerintah yang diwakili oleh Dinsosnakertrans telah menjalankan fungsinya sebagai pelaksana sesuai dengan pendapat dari Soekanto (2005:142) yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu bersinergi dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah sebagai pemimpin formal mampu bersinergi dengan tokoh agama yang merupakan pemimpin informal.

BLK menjadi wadah yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Peneliti melihat memang peran kiai lebih besar karena kiai memiliki wadah pondok pesantren yang mampu diberdayakan agar lulusan pesantren memiliki keterampilan yang cukup untuk menjalankan hidupnya. Untuk agama non-

islam, Dinsosnakertrans hanya memberi ajakan dan himbauan karena tidak adanya wadah khusus yang bisa dioptimalkan, hal ini terjadi karena agama non-islam sangat minoritas di Kabupaten Bangkalan.

Jika ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance*, pembangunan sosial di Kabupaten Bangkalan telah memenuhi sisi keadilan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing agama. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan telah bersikap akuntabel (bertanggung jawab) untuk memajukan kondisi sosial dengan merangkul tokoh agama sehingga diharapkan pembangunan yang diimpikan dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan sosial dibidang ketenagakerjaan melalui BLK yang bekerja sama dengan tokoh agama khususnya kiai menjadikan proses pengembangan keterampilan sangat efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

2. Hubungan Antar Aktor Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Good Governance

Teori good governance digagas oleh *United Nation Development Program* (UNDP) di New York, Amerika Serikat, dimana negara tersebut tidak mengatur urusan beragama bagi rakyatnya sehingga muncul pertanyaan bagaimana jika *good governance* dibawa ke negara yang urusan keagamaanya diatur oleh negara misalkan negara Indonesia. Peneliti merasa sangat antusias dengan praktik *good governance* di negara dengan beragam suku dan adat istiadat serta penduduk

dengan mayoritas Islam terlebih di Madura karena adat istiadatnya telah berasimilasi dengan ajaran agama islam sehingga memunculkan fenomena tokoh agama (informal) memiliki kekuasaan bahkan hampir setara dengan pemimpin daerah (formal).

Setelah melihat peran tokoh agama dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan maka selanjutnya peneliti akan menganalisa hubungan antar aktor dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Hubungan yang baik akan menghasilkan kerjasama yang baik hal ini merupakan dasar dari teori administrasi publik. selain itu, pemerintah harus memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyatakan pendapat hal ini sesuai dengan ruang lingkup administrasi publik dibidang kekuasaan. Hubungan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bangkalan secara umum bisa dikatakan baik meskipun hubungan dengan masyarakat hanya sebatas pada tokoh agama Islam dan tokoh *Blater* dan belum optimal dikalangan tokoh agama non-islam. Hubungan tersebut akan dianalisa lebih jauh menggunakan teori *good governance*.

Terdapat 3 (tiga) aktor didalam teori *good governance* yaitu pemerintah (*state*), masyarakat (*civil society*) dan pihak swasta (*privat*). Untuk aktor pertama yaitu pemerintah sudah jelas kedudukannya yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya adalah *civil society* merupakan masyarakat madani yang bisa dikategorikan sebagai perwakilan dari masyarakat. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya atau sulitnya sektor *privat* untuk masuk dan menanamkan investasinya di Kabupaten Bangkalan hal ini terjadi karena Kabupaten Bangkalan dikenal sebagai daerah yang korup dan penuh dengan upeti ini dibuktikan dengan

terciduknya Fuad Amin oleh KPK. Sektor *privat* di Kabupaten Bangkalan memiliki kecenderungan diwakilkan oleh pengusaha lokal.

Hubungan antar aktor di Kabupaten Bangkalan semuanya berlangsung dengan baik termasuk hubungan antar tokoh agama. Permasalahan utama memang kurangnya sektor privat yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan tetapi melihat keratan dan kehangatan toleransi masing-masing umat beragama membuat masalah tersebut sedikit tertutupi. Tidak adanya konflik Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) di Kabupaten Bangkalan membuktikan bahwa hubungan antar aktor pembangunan berlangsung sangat baik. Peneliti melihat beberapa kemungkinan peletakan tokoh agama sebagai aktor pembangunan karena tokoh agama di Kabupaten Bangkalan memiliki peran besar baik pada lingkungan masyarakat, pemerintahan maupun berdiri sendiri. Oleh sebab itu peneliti menggambarkan tokoh agama sebagai berikut:

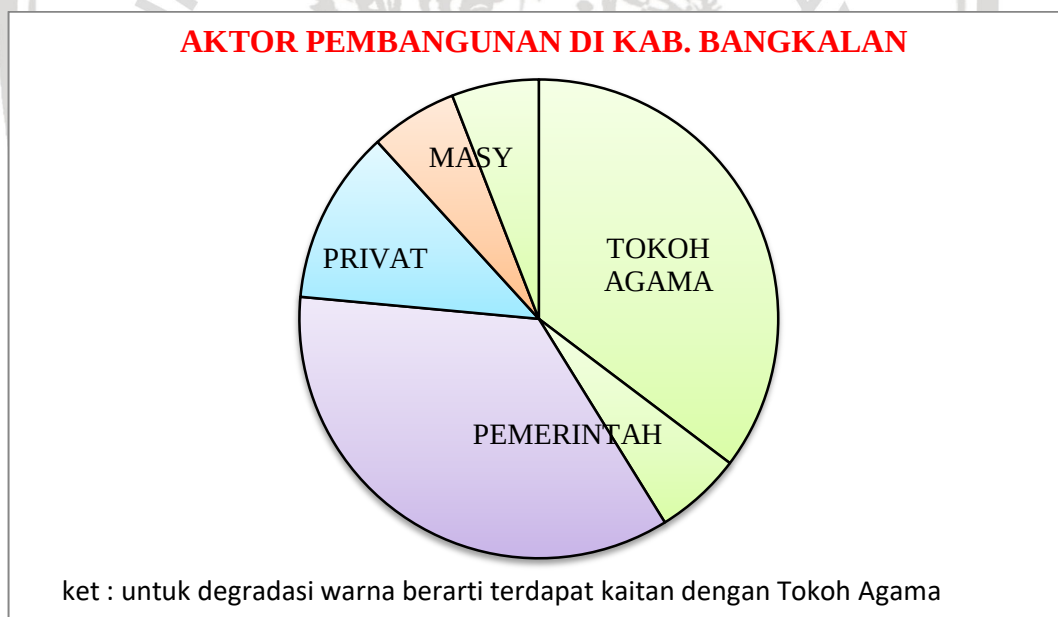
a) Tokoh Agama Sebagai Bagian dari Masyarakat (*Civil Society*)

Peneliti melihat fenomena di Kabupaten Bangkalan yang bersifat unik karena masyarakat madani (*civil society*) memiliki pemimpin informal yaitu tokoh agama terutama tokoh agama Islam. Hal ini membuat tokoh agama menjadi bagian dari *civil society* yang membuat good governance tetap menggunakan pola tiga aktor sehingga definisi *civil society* bisa diperluas. Hal ini dapat menambah keilmuan mengenai *civil society* dimana saat ini *civil society* lebih diarahkan kepada elit massa, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

b) Tokoh Agama Sebagai Bagian dari Pemerintah (State)

Kabupaten Bangkalan memiliki fenomena unik lainnya yaitu Bupati yang mewakili jabatan eksekutif justru berasal dari tokoh agama. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan juga diwakili oleh tokoh agama. Hal inilah yang membuat peneliti menempatkan tokoh agama sebagai bagian dari pemerintah (state). Ini dilakukan karena tokoh agama juga bertindak sebagai pemimpin informal yang dapat bergerak bersama dengan pemimpin formal untuk menyukseskan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.

c) Tokoh Agama Berdiri Sendiri Sebagai Aktor (Informal Leader)



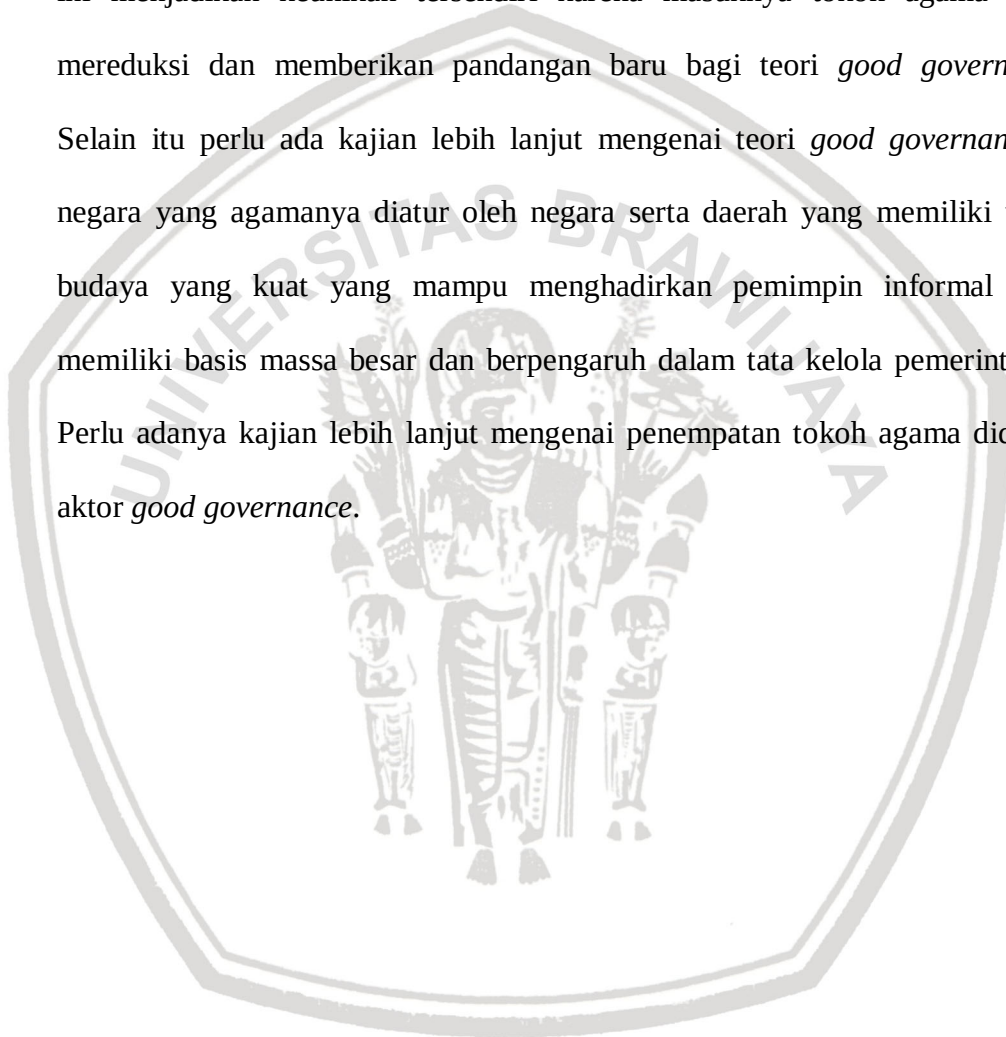
Gambar 8: Aktor Pembangunan Di Kabupaten Bangkalan

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti, 2018), 2018

Gambar diatas menjelaskan bahwa sebagian kecil dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati serta sebagian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan termasuk pada golongan tokoh agama

sehingga tokoh agama bisa dikatakan melebur kedalam aktor lainnya tanpa menghilangkan identitas sebagai tokoh agama.

Gambar diatas juga menunjukkan pola hubungan *good governance* sedikit mengalami pergeseran yang semula 3 (tiga) aktor menjadi 4 (empat) aktor. Hal ini menjadikan keunikan tersendiri karena masuknya tokoh agama dapat mereduksi dan memberikan pandangan baru bagi teori *good governance*. Selain itu perlu ada kajian lebih lanjut mengenai teori *good governance* di negara yang agamanya diatur oleh negara serta daerah yang memiliki unsur budaya yang kuat yang mampu menghadirkan pemimpin informal yang memiliki basis massa besar dan berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penempatan tokoh agama didalam aktor *good governance*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan

Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*

Secara umum tokoh agama sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.

a. Peran Tokoh Agama dalam Pengambilan Keputusan

Peran tokoh agama islam atau kiai sangat berpengaruh di dalam pengambilan keputusan karena memang memiliki ruang yang besar baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Contohnya adalah tokoh agama islam mampu mengusulkan perubahan *city branding* menjadi “Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat”, tetapi perubahan ini belum melibatkan tokoh agama non-islam sehingga tidak sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi, keadilan, partisipasi, dan *strategy vision*.

b. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Infrastruktur

Peran tokoh agama dalam pembangunan infrastruktur umumnya dalam pembangunan tempat ibadah. Peran tokoh agama islam lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur dikarenakan banyaknya pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan. Tokoh agama katolik memiliki akses yaitu “orang

dalam” sedangkan agama Kristen dan Kong Hu Chu masih belum melibatkan pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya. Prinsip *good governance* belum berjalan dengan baik terutama dalam segi kepastian hukum sehingga pembangunan belum efektif dan efisien.

c. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Sosial

Peran tokoh agama dalam pembangunan sosial khususnya dibidang ketenagakerjaan sangat baik. Adanya program Balai Latihan Kerja yang bekerja sama dengan pihak pondok pesantren menjadi bukti bahwa tokoh agama dan pemerintah sangat responsif dalam memajukan masyarakat.

2. Hubungan antar Aktor dalam Pembangunan Dearah di Kabupaten Bangkalan
Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*

Secara umum hubungan antar aktor berjalan baik meskipun minimnya sektor privat di Kabupaten Bangkalan. Peneliti menyimpulkan tiga opsi dalam penempatan tokoh agama dalam good governance. Pertama tokoh agama sebagai bagian dari masyarakat (*civil society*), (kedua tokoh agama sebagai bagian dari pemerintah (*state*), sedangkan yang ketiga yaitu tokoh agama berdiri sendiri sebagai aktor (*religious leader*).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan
Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*

a. Peran Tokoh Agama dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan awal dari sebuah kebijakan oleh sebab itu diharapkan pemerintah Kabupaten Bangkalan memberikan akses yang sama kepada semua tokoh agama baik tokoh agama islam maupun tokoh agama non-islam untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan pelaksanaan prinsip *good governance*.

b. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Bangkalan diharapkan lebih peka terhadap kondisi tempat ibadah agama non islam dan memberikan bantuan kepada agama non islam terkait pembangunan tempat ibadah.

c. Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Sosial

Khusus untuk pembangunan sosial, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan telah memberikan kesempatan pada tokoh agama untuk membangun ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan dan diharapkan program BLK dapat terus konsisten serta menambah kerjasama dengan pesantren dan lembaga pendidikan non-islam.

2. Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan

Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*

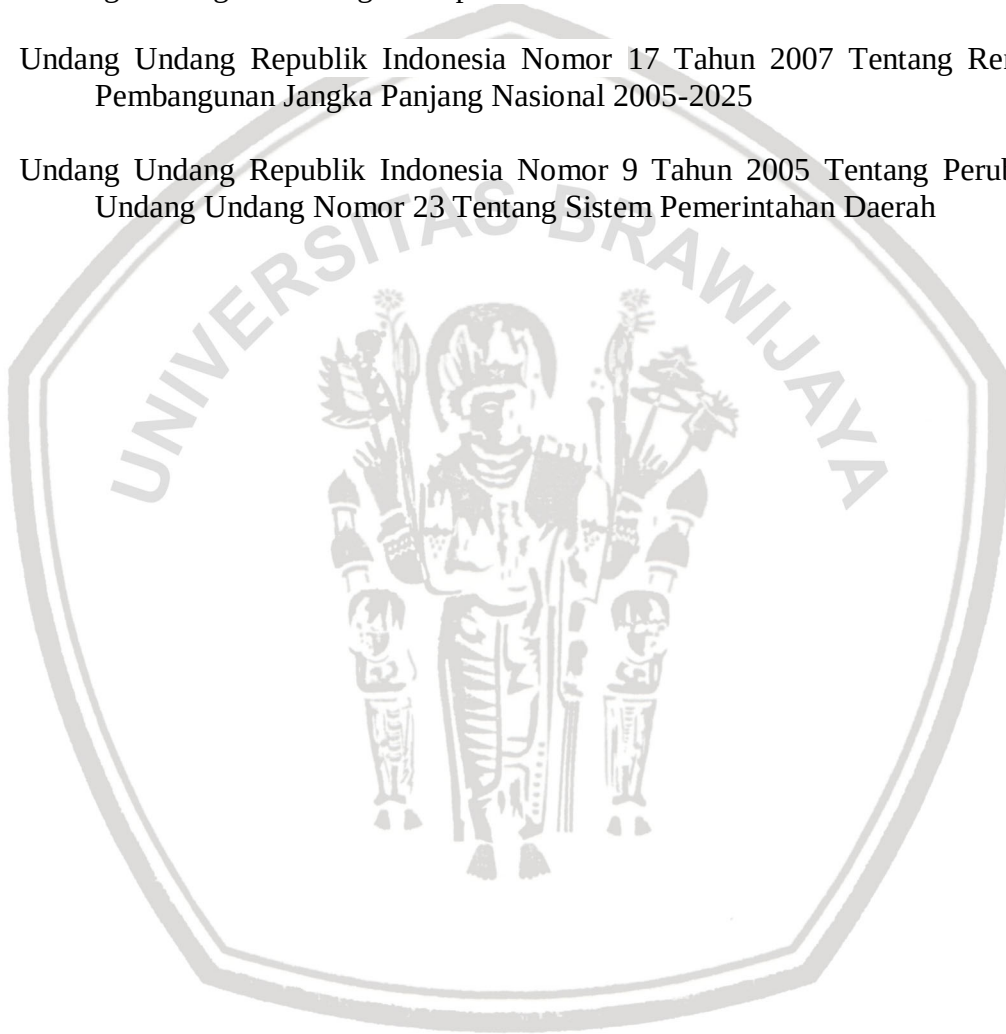
Secara umum hubungan antar aktor dalam pembangunan sudah baik, namun peneliti berharap adanya penelitian lanjutan terkait *good governance* di daerah yang agamanya diatur oleh pemerintah dan juga daerah yang memegang teguh adat istiadatnya sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperkaya keilmuan administrasi publik dan paradigma *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press
- Badan Pusat Statistik. 2015. “*Survey Kependudukan Indonesia*”, diakses pada melalui <http://www.bps.go.id/survey-kependudukan-indonesia> pada tanggal 7 November 2017 pukul 04.50 WIB
- Basuki, Anton dan Shofwan. 2006, *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD FE UNIBRAW
- CIA World Factbook. 2015. Population in The World. Diakses melalui <http://www.worldfactcia.com/population-in-the-world-and-muslim-religion> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 23.49 WIB
- Colfer, Carol J.P dan Doris Capistrano. 2005. *The Politics of Decentralization: Forest, People and Power*. London: Harvard University
- Daff, Richard L. 2006. *Management and Administration*. Jakarta: Salemba Empat
- Dhofier, Zamakhsyari. 1986. *Tradisi Pesantren*. Jakarta : LP3ES
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan ed.1*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Hakim, Luqman. 2013, *Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi*. Malang: UB Press
- Hefni. 2007. Bhuppa’ -Bhabbhu- Ghuru- Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalisme tentang Hierarki Kepatuhan Budaya Masyarakat Madura. *Karsa* Vol. XI No.1 2007
- Jonge, Huub de. 1988, Studi Indisipliner Tentang Masyarakat Madura (Eds) *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi*. Jakarta: LP3S
- Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <http://kbbi.kemendikbud.go.id> pada tanggal 11 November 2017 pukul 18.01 WIB
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Pembangunan Berkesinambungan dalam PJP II*. Malang: FIA UB
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2009. *Modul 1 Kepemimpinan Nasional*. Bahan Ajar PPSA XVI 2009

- Mahmud, Ali. 2014. *Kiai Menguasai Madura*. diakses melalui <http://maduracorner.com/artikel/kiai-menguasai-madura> pada tanggal 3 November 2017 pukul 09.22 WIB
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Arizona: SAGE Publication. Inc
- Moeloeng, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- Pranadjaja, Muhammad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan 2005-2025
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2002. *Makroekonomi*. Raja Garfindo Persada: Surabaya
- Suprayogo, Imam. 2009. *Kyai dan Politik : Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Malang Press
- Suryono. Agus. 2010. *Dimensi Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Teba, Sudirman. 1988. *Islam Orde Baru Dalam Perubahan Politik Keagamaan*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Tjokroamidjojo. Bintoro. 2001. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah



PEDOMAN WAWACARA

Fokus Penelitian :

1. Peran tokoh agama dalam pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*
 - a. Pengambilan keputusan berkaitan dengan pembangunan
 - b. Pembangunan fisik (infrastruktur)
 - c. Pembangunan nonfisik (pembangunan sosial)
2. Hubungan antar aktor dalam pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan ditinjau dari perspektif *good governance*

PERTANYAAN

1. Apakah tokoh agama berperan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah tokoh agama berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di kabupaten bangkalan? Jika berperan dengan cara apa dan contohnya?
3. Apakah tokoh agama berperan dalam pembangunan infrastruktur? Jika berperan dengan cara apa dan contohnya?
4. Apakah tokoh agama berperan dalam pembangunan sosial? Jika berperan dengan cara apa dan contohnya?
5. Apakah pemerintah merespon aspirasi masyarakat, investor dan tokoh agama dalam meningkatkan pembangunan daerah?
6. Apakah pemerintah, tokoh agama, masyarakat dan juga pihak investor pernah mendiskusikan pembangunan daerah? Jika pernah apakah yang didiskusikan dan apa hasilnya?
7. Apakah masyarakat mengetahui segala bentuk pembangunan daerah? Jika mengetahui apakah masyarakat dilibatkan oleh pemerintah atau oleh tokoh agama dalam menyampaikan aspirasi pembangunan?
8. Apakah pernah terjadi konflik antar pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan investor dalam pembangunan daerah?



**Wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA Kab. Bangkalan Bapak Winardi
Tahun 2017**

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti, 2017), 2018



**Wawancara dengan Ketua FKUB Kab. Bangkalan Bapak KH. Zainal Abidin
Tahun 2017**

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti, 2017), 2018



**Dokumentasi dengan Pendeta Gereja Pantekosta Kab. Bangkalan Bapak Pdt.
Zefanja Walujo Tahun 2017**

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti, 2017), 2018



**Wawancara dengan Ka. TU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ibu
Mahmudah Tahun 2017**

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti, 2017), 2018



**Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah Bapak H. Mochammad
Romli Tahun 2017**

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti, 2017), 2018



**Pertemuan antar Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Acara Menyambut
Tahun Baru 2018 yang Diselenggarakan Oleh FKUB Kab. Bangkalan Tahun 2017**

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi Peneliti, 2017), 2018